



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI  
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
GOLONGAN III**

**OPTIMALISASI PENYUSUNAN PETA JALAN PEMBANGUNAN  
KEPENDUDUKAN (PJKP) MELALUI KOMPILASI DATA  
KEPENDUDUKAN DAN PENGUATAN KOORDINASI DI BADAN  
PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
(BAPELITBANGDA) KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**Disusun oleh**

**Nama : Nevris Marta, S.Sos.**  
**NIP : 19971119 202504 1 001**  
**Jabatan : Perencana Ahli Pertama**  
**Instansi : Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman**  
**Kelas / kelompok : II**  
**No. Absen : 16**  
**Angkatan : XXXIII**

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
REGIONAL BUKITTINGGI  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI**

JUDUL : Optimalisasi Penyusunan Peta Jalan  
Pembangunan Kependudukan (PJPK) Melalui  
Kompilasi Data Kependudukan dan Penguatan  
Koordinasi di Badan Perencanaan, Penelitian  
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang  
Pariaman

NAMA : Nevris Marta, S.Sos.

NIP : 19971119 202504 1 001

PANGKAT/GOL. : Penata Muda / III.a

JABATAN : Perencana Ahli Pertama

INSTANSI : Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

ANGKATAN/KELOMPOK : XXXIII/2

NO. ABSEN : 16

Disetujui untuk diimplementasikan pada tahap habituasi, dan selanjutnya diujikan pada Seminar Rancangan Aktualisasi Latsar CPNS Golongan III, Angkatan XXXIII Kelompok II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2025 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi.

Bukittinggi, 28 November 2025

**Coach,**

**Penguji,**

(Ratna Sriwina, M.Si.)  
NIP.19750813 200801 2 001

(Afri Yendra, S.H., M.H.)  
NIP.19680421 199401 1 001

**Mengetahui**

Kepala Pusat

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kementerian Dalam Negeri  
Regional Bukittinggi

(Sariyadi, SS.,M.A.P)  
NIP. 197003041996031001

**BERITA ACARA**  
**SEMINAR RANCANGAN AKTUALISASI**

Pada Hari : Jumat  
Tanggal : 28 November 2025  
Pukul : 08.00 s/d Selesai  
Tempat : Kampus PPSDM Regional Bukittinggi  
Telah Diseminarkan Lapora Pelaksanaan Aktualisasi Latsar CPNS Angkatan  
XXXIII Tahun 2025.

JUDUL : Optimalisasi Penyusunan Peta Jalan  
Pembangunan Kependudukan (PJPK) Melalui  
Kompilasi Data Kependudukan dan Penguatan  
Koordinasi di Badan Perencanaan, Penelitian  
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang  
Pariaman

Disusun Oleh : Nevris Marta, S.Sos.  
Kelompok : 2  
No. Presensi : A.33.2.16  
INSTANSI : Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman  
JABATAN : Perencana Ahli Pertama

Dan telah mendapat pengujian/komentar/masukan/saran dari Penguji, Mentor,  
dan Coach/Moderator

**COACH**

(Ratna Sriwina, M.Si.)  
NIP. 197508132008012001

**PESERTA**

(Nevris Marta, S.Sos.)  
NIP. 199711192025041001

**PENGUJI**

(Afri Yendra, S.H., M.H.)  
NIP.19680421 199401 1 001

**MENTOR**

(Zuinna Marlius, SKM, M.Kes.)  
NIP. 198302082005012007

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi dengan judul *“Optimalisasi Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Melalui Kompilasi Data Kependudukan dan Penguatan Koordinasi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) Kabupaten Padang Pariaman.”*

Laporan aktualisasi ini merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan aktualisasi selama masa Pelatihan Dasar CPNS sebagai wujud penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK dan prinsip Smart ASN serta Manajemen ASN. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, mulai dari pengidentifikasian isu, kompilasi data kependudukan, konsultasi dengan OPD kunci, hingga penyusunan draft awal PJPK, merupakan bagian dari upaya mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan kependudukan di Kabupaten Padang Pariaman.

Pemilihan isu PJPK didasarkan pada urgensinya sebagai dokumen strategis yang berfungsi mengarahkan pembangunan kependudukan yang terintegrasi, berbasis data, serta selaras dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Melalui kegiatan ini diharapkan Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman memperoleh landasan yang lebih kuat dalam penyusunan PJPK yang akurat, akuntabel, dan kolaboratif.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mentor, coach, Widyaiswara, serta seluruh rekan kerja di lingkungan Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman yang telah memberikan waktu, bantuan, masukan, dan motivasi selama proses aktualisasi berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat nyata,

khususnya dalam mendukung optimalisasi penyusunan PJKK di Kabupaten Padang Pariaman, serta menjadi kontribusi kecil dalam memperkuat tata kelola pembangunan kependudukan yang lebih baik.

Padang Pariaman, 19 November 2025

Peserta

Nevris Marta, S.Sos.  
NIP.199711192025041001

## DAFTAR ISI

### Contents

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	i
BERITA ACARA SEMINAR RANCANGAN AKTUALISASI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan.....	1
C. Ruang Lingkup .....	4
BAB II PROFIL INSTANSI DAN PESERTA .....	5
A. Profil Instansi .....	5
1. Visi Misi Kepala Daerah.....	5
2. Tugas, Fungsi dan Struktur Bapelitbangda .....	6
B. Profil Peserta .....	10
BAB III RINGKASAN RANCANGAN AKTUALISASI .....	13
A. Deskripsi Core Isu.....	13
B. Analisis Core Isu .....	14
C. Rumusan Isu .....	15
D. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu .....	16
BAB IV CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI .....	20
A. Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi .....	20
B. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi.....	21
C. Matrik Rekapitulasi Pelaksanaan Habitiasi NND PNS (BerAKHLAK).....	32
D. Capaian Penyelesaian Core Isu.....	33
E. Manfaat terselesainya Core Isu .....	34
F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi.....	36
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	37
A. Kesimpulan .....	37
B. Rekomendasi.....	39
Daftar Pustaka .....	40
LAMPIRAN .....	41

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi .....	20
Tabel 4. 2 Matriks Rancangan Kegiatan Aktualisasi .....	21
Tabel 4. 3 Matriks Rekapitulasi Habituasi (BerAKHLAK) .....	32
Tabel 4. 4 Capaian Penyelesaian Core Isu .....	33
Tabel 4. 5 Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi .....	36

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bapelitbangda Kab. Padang Pariaman..	9
Gambar 3. Profil Peserta .....	10
Gambar 4. Menggunakan Metode Mind Map.....	15

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan kependudukan merupakan salah satu aspek fundamental dalam perencanaan pembangunan daerah karena mencakup pengelolaan jumlah, kualitas, persebaran, dan administrasi kependudukan yang secara langsung mempengaruhi keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Kabupaten Padang Pariaman sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional dituntut untuk memiliki dokumen perencanaan kependudukan yang jelas, terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan. Salah satu instrumen penting yang dibutuhkan adalah Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai turunan dari Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).

PJPK merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat arah kebijakan, strategi, indikator, serta kerangka operasional pembangunan kependudukan. Keberadaan PJPK menjadi penting karena dokumen ini mendukung integrasi kebijakan kependudukan lintas sektor serta menjadi fondasi perencanaan untuk mewujudkan bonus demografi yang produktif menuju visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang berdaya saing, inklusif, dan bertumpu pada kualitas sumber daya manusia.

Secara regulatif, kewajiban penyusunan PJPK telah ditegaskan dalam berbagai peraturan. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 mewajibkan setiap provinsi, kabupaten, dan kota menyusun PJPK sebagai pedoman operasional pembangunan kependudukan lima tahunan. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menegaskan pentingnya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, persebaran penduduk, serta administrasi kependudukan sebagai landasan pembangunan manusia. Selain itu, Permendagri Nomor 40 Tahun 2012 memberikan pedoman teknis proyeksi penduduk yang sangat diperlukan untuk menetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah.

Namun hingga saat ini Kabupaten Padang Pariaman belum memiliki dokumen PJPK, sehingga arah pembangunan kependudukan belum memiliki landasan teknis yang terstruktur. Akibatnya, integrasi perencanaan kependudukan lintas sektor belum optimal. Setiap OPD seperti Disdukcapil, Dinas Kesehatan, DINSOSP3A, Disdagnakerkop, dan DPPKB menjalankan program berdasarkan mandat sektoral masing-masing, menyebabkan data kependudukan menjadi parsial, tidak terstandarisasi, dan terfragmentasi. Kondisi ini menghambat sinkronisasi antarprogram serta memperlemah praktik evidence-based planning.

Masalah koordinasi juga muncul karena forum penyelarasan indikator dan program antar-OPD tidak berjalan rutin. Di sisi aparatur, pemahaman terhadap GDPK dan penyusunan PJPK masih terbatas sehingga proses penyusunan dokumen lambat dan tidak optimal. Minimnya literasi teknis juga mengganggu kemampuan daerah dalam merespons dinamika demografi yang akan menentukan kesiapan menuju Indonesia Emas 2045, khususnya dalam pengelolaan kualitas dan kuantitas penduduk.

Jika kondisi ini dibiarkan, pembangunan kependudukan di Kabupaten Padang Pariaman berisiko berjalan tanpa arah yang jelas. Dampak serius dapat terjadi, seperti tidak tercapainya target RPJMD 2025–2029, ketidaksiapan menghadapi perubahan struktur umur penduduk, hingga gagalnya daerah mengambil manfaat optimal dari momentum bonus demografi menjelang 2030–2040 yang menjadi salah satu fondasi keberhasilan Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan analisis menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth), terdapat tiga isu strategis yang teridentifikasi—(1) belum adanya pedoman manajemen risiko, (2) belum optimalnya penyusunan PJPK, dan (3) lemahnya koordinasi metadata antar-OPD. Isu “Belum Optimalnya Penyusunan PJPK” memperoleh skor tertinggi (15) dan ditetapkan sebagai core issue. Hal ini menunjukkan bahwa isu tersebut sangat mendesak, serius, dan berpotensi berkembang kompleks jika tidak segera ditangani.

Dalam konteks tersebut, penyusunan Draft Awal Kerangka PJPK menjadi langkah strategis. Draft ini memuat latar belakang, dasar hukum, tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta analisis awal berdasarkan pendekatan PSRI. Penyusunan draft awal tidak hanya menghasilkan dokumen teknis, tetapi juga menjadi pijakan penting bagi daerah untuk menyusun kebijakan yang selaras dengan RPJMD, GDPK, serta agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 yang menempatkan kualitas penduduk sebagai pilar utama.

Sebagai seorang CPNS Perencana Ahli Pertama di Bidang Sosial Budaya Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman, penulis berkewajiban memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian isu strategis ini. Pelaksanaan aktualisasi melalui kompilasi data, konsultasi lintas-OPD, penyusunan PSRI, dan penyusunan draft awal PJPK merupakan bentuk nyata implementasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK dan prinsip Smart ASN, terutama dalam bekerja berbasis data, berkolaborasi lintas sektor, serta beradaptasi dengan dinamika pembangunan kependudukan.

## **B. Tujuan**

### **a) Tujuan Umum**

Mendukung penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Padang Pariaman melalui penguatan tata kelola data kependudukan dan koordinasi lintas-OPD, sehingga tersusun draft awal PJPK 2025–2029 yang akurat, terukur, dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah.

### **b) Tujuan Khusus**

1. Menyediakan dasar data kependudukan yang terstruktur melalui proses kompilasi data dari OPD penyedia data.
2. Memperoleh pemahaman dan kesepakatan lintas-OPD terkait analisis indikator menggunakan pendekatan PSRI (Pressure–State–Response–Impact).
3. Meningkatkan efektivitas koordinasi antar-OPD dalam penyelarasan indikator, definisi operasional, dan kebutuhan data kependudukan.

4. Menghasilkan draft awal PJPK Kabupaten Padang Pariaman yang mencakup latar belakang, dasar hukum, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan.
5. Mengaktualisasikan nilai dasar ASN BerAKHLAK dan prinsip Smart ASN melalui proses penyusunan dokumen berbasis data, kolaboratif, dan akuntabel.

### **C. Ruang Lingkup**

Berdasarkan isu yang dipilih, ruang lingkup kegiatan aktualisasi difokuskan pada penyusunan draft awal PJPK Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan meliputi pengumpulan dan kompilasi data kependudukan dari OPD terkait, konsultasi dengan OPD kunci, kajian perbandingan dokumen PJPK provinsi/kabupaten lain, serta penyusunan rekomendasi awal. Target dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen draft awal PJPK Kabupaten Padang Pariaman 2025–2029 sebagai acuan awal perencanaan kependudukan daerah. Pelaksanaan aktualisasi ini akan dilaksanakan oleh penulis pada masa habituasi Latsar CPNS, mulai tanggal 6 Oktober 2025 sampai dengan 14 November 2025 (selama 30 hari), bertempat di Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Padang Pariaman, dengan melibatkan OPD terkait yang membidangi kependudukan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, dan keluarga berencana.

## **BAB II**

### **PROFIL INSTANSI DAN PESERTA**

#### **A. Profil Instansi**

##### **1. Visi Misi Kepala Daerah**

Visi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah Kabupaten Padang Pariaman Maju dan Sejahtera yang memperlihatkan adanya upaya untuk menyeimbangkan pembangunan daerah dalam berbagai bidang urusan. Visi ini diterjemahkan ke dalam 5 (lima) Misi Pembangunan yang merupakan langkah untuk mencapai Visi Kabupaten Padang Pariaman tersebut, sebagaimana berikut.

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas
2. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif, maju dan merata
4. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan kehidupan sosial yang religius, harmonis dan berbudaya.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2025-2029[4] serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan yang diselenggarakan Bapelitbangda maka fungsi dan tugas Bapelitbangda terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”. Khususnya terkait dengan tujuan ke-1 pada misi ke-1 yaitu Terwujudnya Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sasaran ke-1 yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas” dan sasaran ke-2 yaitu “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Adaptif dan Inovatif” yang diukur dengan Nilai Sakip Pemerintah Daerah, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Inovasi Daerah.

## **2. Tugas, Fungsi dan Struktur Bapelitbangda**

Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman salah satu perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang pembentukannya diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016[5] tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 76 Tahun 2021, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

Tugas Pokok: Membantu Bupati Padang Pariaman dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

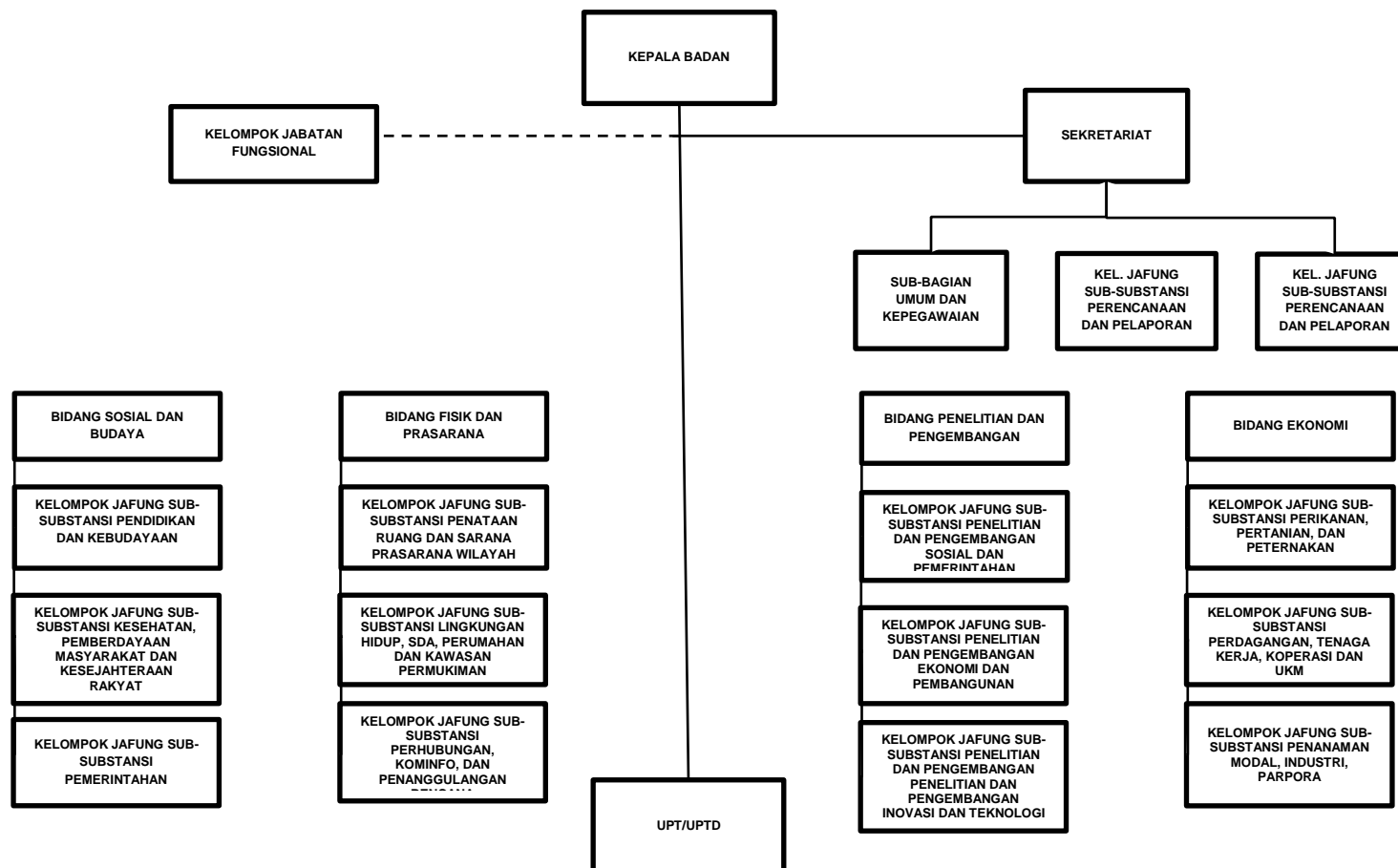
1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi terdiri dari:
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
  - c. Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Keuangan
3. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari:
  - a. Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Pendidikan dan Kebudayaan
  - b. Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat
  - c. Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Pemerintahan
4. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari:
  - a. Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Penataan Ruang dan Sarana Prasarana Wilayah
  - b. Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
  - c. Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Penanggulangan Bencana
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
  - a. Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan
  - b. Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan
  - c. Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

## 6. Bidang Ekonomi

- a. Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Perikanan, Pertanian dan Peternakan.
- b. Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
- c. Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Penanaman Modal, Industri, Parpora.

## 7. UPT/UPT

Gambar 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bapelitbangda Kab. Padang Pariaman.



## **B. Profil Peserta**

Penulis adalah seorang CPNS dengan jabatan Perencana Ahli Pertama di Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Berikut profil penulis:

**Gambar 2. Profil Peserta**



NAMA : Nevris Marta, S.Sos.  
NIP : 199711192025041001  
PANGKAT/GOL : Penata Muda / III.a  
JABATAN : Perencana Ahli Pertama  
INSTANSI : Bapelitbangda Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

### **Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan**

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana[6] dan Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana[7], dinyatakan bahwa Jabatan Fungsional Perencana adalah sekelompok jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

### **a. Tugas Pokok**

Tugas pokok Perencana Ahli Pertama adalah melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan, yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan. Secara rinci, tugas pokok pada jenjang Ahli Pertama diwujudkan dalam:

- Menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja perangkat daerah).
- Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan, khususnya pada bidang sosial budaya.
- Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data sektoral untuk mendukung perencanaan pembangunan.
- Melaksanakan analisis sederhana sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
- Menyusun laporan hasil perencanaan dan rekomendasi kebijakan.

### **b. Fungsi**

Fungsi Perencana Ahli Pertama, sebagaimana diatur dalam PermenPANRB 4/2020 dan Juknis Bappenas (KEP.10/2020), adalah sebagai berikut:

#### **1. Perencanaan Program**

- Mengidentifikasi masalah pembangunan dengan kompleksitas sederhana.
- Menyusun kerangka kerja perencanaan sesuai arah kebijakan daerah.
- Merumuskan indikator kinerja pembangunan.

#### **2. Pengumpulan dan Pengolahan Data**

- Melaksanakan pengumpulan data sektoral (sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, kependudukan).
- Mengolah data menjadi informasi dasar perencanaan pembangunan.
- Menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, atau analisis ringkas.

### **3. Analisis dan Penyusunan Dokumen**

- Melaksanakan kajian sederhana terkait isu-isu pembangunan.
- Menyusun rancangan dokumen rencana pembangunan daerah.
- Memberikan masukan teknis dalam forum Musrenbang dan konsultasi publik.

### **4. Evaluasi dan Monitoring**

- Memantau pelaksanaan rencana pembangunan.
- Menyusun laporan evaluasi capaian indikator pembangunan.
- Memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi.

### **5. Koordinasi dan Diseminasi**

- Menyampaikan hasil perencanaan dalam forum lintas OPD.
- Mendukung koordinasi antar sektor untuk keterpaduan perencanaan pembangunan.
- Membantu Perencana Ahli Muda/Madya dalam penyusunan dokumen perencanaan yang lebih kompleks.

## **BAB III**

### **RINGKASAN RANCANGAN AKTUALISASI**

#### **A. Deskripsi Core Isu**

Permasalahan utama yang menjadi focus dalam pelaksanaan aktualisasi ini adalah "Belum Optimalnya Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPk) di Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman" isu ini perlu mendapat perhatian khusus dan dicari penanganannya

#### **a) Kondisi Masalah/Isu**

Sesuai amanat Perpres No. 153 Tahun 2014 tentang GDPK, setiap daerah wajib menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPk) sebagai pedoman lima tahunan. Di Kabupaten Padang Pariaman, hingga saat ini belum tersedia dokumen teknis PJPk yang menjadi turunan dari Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Perencanaan kependudukan masih bersifat parsial di masing-masing OPD seperti Disdukcapil, DINSOSP3A, Dinas Kesehatan, Disdagnakerkop, dan DPPKB, sehingga data dan program belum terintegrasi. Selain itu, tidak ada acuan bersama yang dapat dipakai untuk mengukur capaian pembangunan kependudukan periode 2025–2029.

#### **b. Dampak dan Pihak yang terdampak**

Tanpa PJPk, pembangunan kependudukan di kabupaten akan berjalan tanpa arah yang jelas. Dampaknya adalah program antar-OPD sulit disinkronkan, capaian target RPJMD 2025–2029 berpotensi tidak tercapai, serta peluang bonus demografi bisa terlewat. Pihak terdampak meliputi pemerintah daerah yang kesulitan menyusun kebijakan berbasis data, OPD teknis yang berjalan sendiri-sendiri, serta masyarakat yang tidak memperoleh manfaat optimal dari kebijakan kependudukan.

### **c. Keterkaitan dengan Agenda III**

Isu ini relevan dengan Smart ASN karena penyusunan PJPK menuntut ASN yang mampu bekerja kolaboratif lintas sektor, kompeten dalam analisis data kependudukan, serta akuntabel dalam menyusun perencanaan berbasis evidence. PJPK juga mencerminkan peran ASN sebagai perencana pembangunan yang adaptif menghadapi dinamika sosial-demografi menuju visi Indonesia Emas 2045.

### **B. Analisis Core Isu**

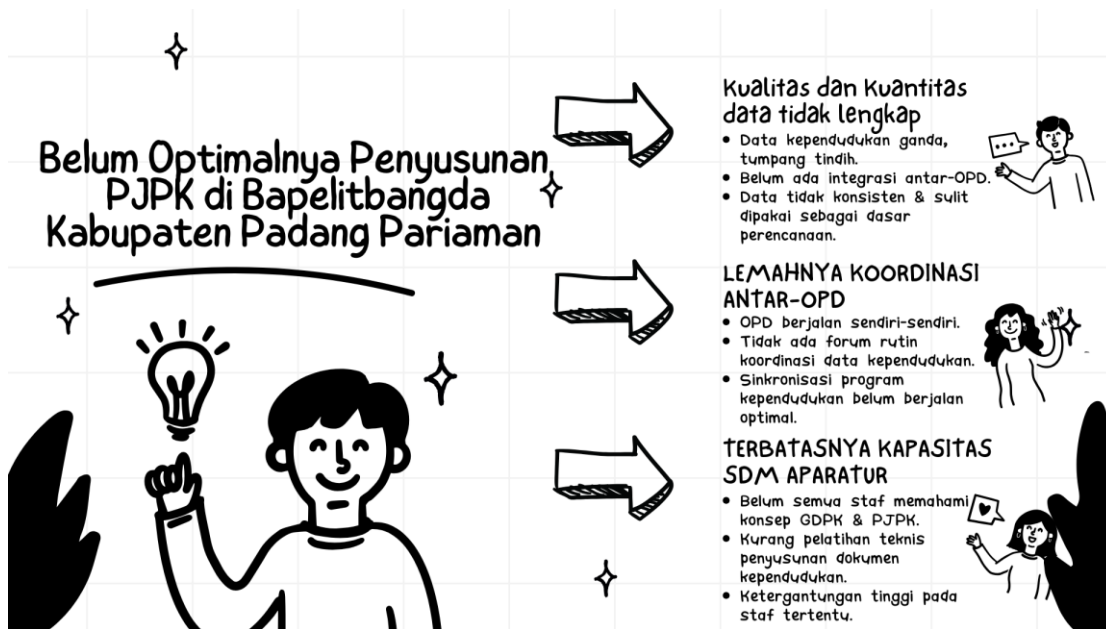
Berdasarkan hasil tapisan dengan metode USG, isu yang ditetapkan sebagai **Core Isu** adalah *belum optimalnya penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman*.

Isu ini muncul karena terdapat beberapa akar permasalahan utama menggunakan metode Mindmap:

1. **Kualitas dan kuantitas data kependudukan yang tidak lengkap serta belum terintegrasi antar-OPD.** Kondisi ini menimbulkan data ganda, tumpang tindih, serta inkonsistensi angka, sehingga sulit dipakai sebagai dasar perencanaan yang valid. Akibatnya, arah pembangunan kependudukan menjadi lemah karena tidak ditopang oleh bukti yang kuat.
2. **Lemahnya koordinasi antar-OPD dalam bidang kependudukan.** Masing-masing OPD masih berjalan sendiri-sendiri dan belum ada forum rutin untuk menyelaraskan program maupun indikator kependudukan. Hal ini membuat sinkronisasi lintas sektor tidak tercapai, padahal pembangunan kependudukan seharusnya melibatkan banyak pihak seperti Disdukcapil, Dinas Kesehatan, DINSOSP3A, Disdagnakerkop, dan DPPKB.
3. **Terbatasnya kapasitas SDM aparatur** dalam memahami substansi GDPK dan PJPK. Belum semua staf memiliki pemahaman mendalam, pelatihan teknis juga masih terbatas, dan beban kerja cenderung terkonsentrasi pada

staf tertentu. Keterbatasan ini berdampak pada lambatnya proses penyusunan dokumen PJKP yang komprehensif dan berbasis data.

Gambar 3. Menggunakan Metode Mind Map



### C. Rumusan Isu

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, analisis kondisi eksisting, serta penelaahan terhadap tugas dan fungsi Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, maka dirumuskan isu aktualisasi sebagai berikut:

**“Belum Optimalnya Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJKP) di Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman”.**

Isu ini ditetapkan sebagai core isu karena ketiadaan PJKP sebagai dokumen teknis turunan GDPK menyebabkan proses perencanaan kependudukan belum memiliki arah yang terstruktur, terintegrasi, dan berbasis data lintas-OPD. Hal ini berdampak pada lemahnya sinkronisasi perencanaan kependudukan, risiko tidak

tercapainya target RPJMD 2025–2029, serta berpotensi menghambat kesiapan daerah dalam menghadapi bonus demografi 2035.

Rumusan isu ini diperkuat melalui proses analisis menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth), yang menunjukkan bahwa akar masalah yang paling dominan adalah:

1. Ketersediaan data kependudukan yang tidak lengkap dan belum terintegrasi antar-OPD, sehingga menghambat proses kompilasi data dasar kependudukan.
2. Koordinasi lintas-OPD dalam isu kependudukan masih lemah, menyebabkan informasi berjalan parsial.
3. Pemahaman SDM terhadap substansi GDPK dan PJPk masih terbatas, sehingga penyusunan PJPk tidak berjalan optimal.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, isu ini dinilai mendesak untuk ditangani karena berpengaruh langsung terhadap kualitas perencanaan pembangunan, efektivitas sinkronisasi kebijakan kependudukan, dan kesiapan Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun dokumen PJPk periode 2025–2029.

#### **D. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu**

Maka gagasan kreatif yang akan dilakukan untuk menyelesaikan Core Isu tersebut di atas adalah **“Optimalisasi Penyusunan PJPk melalui Kompilasi Data Kependudukan dan Penguatan Koordinasi di Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman”**

**Dari sisi Manajemen ASN**, gagasan ini memperlihatkan bagaimana seorang ASN dituntut bekerja secara sistematis, akuntabel, dan profesional. Kompilasi data kependudukan merupakan bentuk penerapan manajemen berbasis evidence sehingga perencanaan menjadi lebih terukur. Koordinasi lintas OPD mencerminkan fungsi manajemen ASN dalam menggerakkan dan menyatukan sumber daya aparatur agar tujuan bersama dapat tercapai.

**Dari sisi Smart ASN**, gagasan ini melatih saya untuk bekerja secara profesional dan adaptif. Penyusunan PJPk menuntut ASN yang mampu berpikir berbasis data, kolaboratif, dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Misalnya, karena keterbatasan waktu, koordinasi yang semula direncanakan melalui forum besar dapat disesuaikan menjadi konsultasi singkat, tetapi tetap menjaga substansi. Hal ini mencerminkan perilaku adaptif seorang Smart ASN. Selain itu, gagasan ini juga mendukung orientasi jangka panjang ASN dalam berkontribusi terhadap pembangunan nasional, khususnya dalam menyongsong bonus demografi, RPJMD 2025–2029, hingga visi Indonesia Emas 2045.

Dengan demikian, gagasan kreatif ini tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan penyusunan PJPk, tetapi juga sarana pembelajaran untuk membentuk diri saya sebagai ASN yang profesional, kompeten, akuntabel, dan mampu beradaptasi dengan tantangan masa depan.

Dengan demikian, gagasan kreatif ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan permasalahan terkait belum optimalnya penyusunan PJPk di Kabupaten Padang Pariaman, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas birokrasi yang adaptif, kolaboratif, serta berbasis data. Gagasan ini sejalan dengan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) serta prinsip Smart ASN yang menekankan pentingnya inovasi, kolaborasi, dan kemampuan analitis dalam mendukung perencanaan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk mewujudkan gagasan kreatif tersebut, kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama masa habituasi adalah sebagai berikut:

#### **1) Konsultasi Rencana Awal Aktualisasi dan Permintaan Persetujuan Mentor**

Kegiatan ini merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan aktualisasi. Pada tahap ini, penulis berkonsultasi dengan mentor terkait kesesuaian isu aktualisasi, ruang lingkup kegiatan, serta tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan.

Penulis juga meminta izin pelaksanaan kegiatan secara resmi agar seluruh proses aktualisasi berjalan sesuai prosedur dan selaras dengan tugas fungsi Bapelitbangda.

Kegiatan ini bertujuan memastikan aktualisasi memiliki arah yang jelas, relevan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

## **2) Mengidentifikasi Indikator Kependudukan & OPD Penyedia Data sebagai Dasar Penyusunan PJPK**

Tahap ini merupakan fondasi dari keseluruhan rangkaian aktualisasi. Penulis mengumpulkan referensi berupa pedoman PJPK, materi dari Kemendagri/Bangda, serta dokumen perencanaan daerah.

Setelah memperoleh pemahaman yang komprehensif, penulis menyusun daftar indikator kependudukan serta memetakan OPD penyedia data yang relevan seperti Disdukcapil, DPPKB, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan DINSOSP3A.

Kegiatan ini bertujuan memastikan penyusunan PJPK nantinya berbasis data yang valid dan berasal dari sumber yang tepat.

## **3) Menyusun Kolom PSRI (Pressure–State–Response–Impact) dan Melakukan Konsultasi dengan OPD Kunci**

Tahap ini merupakan proses pendalaman substansi indikator kependudukan. Penulis menyusun tabel PSRI berdasarkan indikator yang telah direkap dan kemudian melakukan konsultasi dengan OPD kunci, khususnya DPPKB.

Konsultasi dilakukan untuk memperoleh penjelasan mendalam mengenai tekanan, kondisi, respons program, dan dampak dari masing-masing indikator.

Kegiatan ini memastikan analisis PJPK tidak hanya berbasis angka, namun juga menggambarkan kondisi nyata di lapangan.\

## **4) Melaksanakan Sharing Session Internal dan Mengkaji PJPK Daerah Lain**

Untuk memperkuat pemahaman dan mendapatkan perspektif perbandingan, penulis melakukan benchmarking dengan mengkaji PJPK daerah lain serta melaksanakan sharing session bersama bidang terkait.

Hasil diskusi ini memberikan wawasan mengenai struktur dokumen, pendekatan analisis PSRI, serta rekomendasi penyusunan PJPK yang lebih sesuai dengan konteks lokal.

Kegiatan ini membantu memperkaya analisis dan memperkuat kualitas draft PJPK yang akan disusun.

#### **5) Menyusun Draft Awal PJPK Kabupaten Padang Pariaman dan Melakukan Review dengan Mentor**

Berdasarkan seluruh data dan masukan yang telah diperoleh, penulis menyusun draft awal PJPK yang memuat latar belakang, analisis indikator, PSRI, serta rekomendasi awal arah kebijakan.

Draft ini kemudian dikonsultasikan kepada mentor dan atasan untuk memperoleh saran perbaikan.

Tujuan kegiatan ini adalah menghasilkan draft yang sistematis, akurat, dan selaras dengan kebutuhan organisasi.

#### **6) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Aktualisasi**

Tahap terakhir adalah menyusun laporan pelaksanaan kegiatan aktualisasi secara menyeluruh, mulai dari tahapan awal hingga finalisasi.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus dokumentasi resmi atas seluruh proses aktualisasi selama masa habituasi.

Dokumen diserahkan kepada mentor untuk ditinjau dan mendapatkan tanda terima sebagai bukti penyampaian formal.

**BAB IV**  
**CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI**

**A. Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi**

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi telah berjalan dengan baik sesuai rencana yang telah disusun. Ada 5 kegiatan yang dilaksanakan pada masa Habitiasi yang dipaparkan pada tabel matrik berikut:

**Tabel 4. 1 Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi**

NO	KEGIATAN	OKTOBER				NOVEMBER	
		I	II	III	IV	I	II
1.	Melakukan Konsultasi dengan mentor terkait rencana pelaksanaan aktualisasi						
2.	Melakukan Kompilasi Data Kependudukan Dasar						
3.	Melakukan Konsultasi & Koordinasi dengan OPD Kunci						
4.	Mengkaji PJPK Daerah Lain & Melaksanakan Sharing Session Internal di Bapelitbangda						
5.	Melakukan Penyusunan Draft Awal Kerangka PJPK Kabupaten Padang Pariaman						

## B. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi

<b>Unit Kerja</b>	Perencana Ahli Pertama - Bidang Sosial Budaya- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
<b>Identifikasi Isu</b>	1. Belum adanya Pedoman Manajemen Risiko Di Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman 2. Belum Optimalnya Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman 3. Kurangnya Koordinasi Metadata Indikator antar-OPD Di Kabupaten Padang Pariaman
<b>Isu yang Diangkat</b>	Belum Optimalnya Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman
<b>Gagasan Pemecahan Isu</b>	Optimalisasi Penyusunan PJPK melalui Kompilasi Data Kependudukan dan Penguatan Koordinasi di Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 4. 2 Matriks Rancangan Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/ Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Ber-AKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK AK	Solusi Jika Ada Konflik	Ket.
1	Melakukan Konsultasi dengan mentor terkait rencana pelaksanaan aktualisasi	1. Mempersiapkan bahan konsultasi	Tersedianya bahan konsultasi	<b>Akuntabel:</b> Saya menyiapkan bahan konsultasi secara lengkap dan terdokumentasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan. <b>Kompeten:</b> Saya menguasai substansi isu aktualisasi agar dapat menjelaskan	Mentor	TIDAK		Kegiatan meminta izin pelaksanaan kegiatan Aktualisasi

				<p>secara runtut kepada mentor.</p> <p><b>Harmonis:</b> Saya menjaga sikap sopan santun serta menghargai pendapat mentor dalam setiap interaksi dan membangun komunikasi yang baik.</p> <p><b>Kolaboratif:</b> Saya membangun diskusi dua arah dengan mentor untuk menggali masukan secara terbuka demi penyempurnaan rancangan aktualisasi.</p>				<p>memperkuat nilai</p> <p><b>Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif, Kolaboratif</b></p>
		2. Melaksanakan konsultasi dengan mentor	Tersedianya catatan hasil konsultasi dan dokumentasi	<p><b>Akuntabel:</b> Saya mendokumentasikan hasil konsultasi secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p><b>Kompeten:</b> Saya memahami substansi diskusi sehingga masukan mentor dapat saya terapkan secara tepat.</p> <p><b>Berorientasi Pelayanan:</b> Saya terbuka menerima saran dan kritik sebagai bahan perbaikan untuk mendukung perbaikan perencanaan kependudukan.</p> <p><b>Harmonis:</b> Saya menjaga sikap sopan santun serta menghargai pendapat mentor dalam setiap interaksi dan membangun komunikasi yang baik.</p> <p><b>Kolaboratif:</b> Saya membangun diskusi dua arah dengan mentor untuk menggali masukan secara terbuka demi penyempurnaan rancangan aktualisasi.</p>		TIDAK		
		3. Meminta	Tersedianya	<b>Akuntabel:</b>		TIDAK		

		persetujuan mentor terkait aktualisasi	surat persetujuan pelaksanaan Aktualisasi	<p>Saya memastikan surat persetujuan dibuat sesuai prosedur dan terdokumentasi resmi.</p> <p><b>Loyal:</b> Saya mematuhi aturan organisasi dengan mengajukan surat sesuai mekanisme yang berlaku.</p> <p><b>Harmonis:</b> Saya menjaga komunikasi baik dengan mentor dan atasan agar proses persetujuan berjalan lancar</p> <p><b>Adaptif:</b> Saya menyesuaikan draft aktualisasi dengan masukan dan arahan dari mentor sebelum ditetapkan, agar rencana yang dibuat lebih tepat dan kontekstual</p>				
2	Melakukan Kompilasi Data Kependudukan Dasar	1. Mengidentifikasi Sumber data (indikator kependudukan) & OPD penyedia data	Tersedianya daftar indikator dan daftar OPD yang relevan.	<p><b>Harmonis:</b> Saya membangun komunikasi baik dengan OPD penyedia data.</p> <p><b>Kompeten:</b> Saya menggunakan kemampuan analisis untuk menentukan indikator kependudukan yang relevan.</p> <p><b>Akuntabel:</b> Saya mencatat hasil identifikasi secara tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p><b>Kolaboratif:</b> Saya melibatkan OPD terkait sejak tahap identifikasi agar proses berjalan kolaboratif</p>	Disduk apil, DINSO SP3A, Dinas Kesehat an, Disdagn akerkop ,DPPKB , Bapelitb angda	YA	Apabila OPD belum dapat menyampaikan data yang diminta, maka akan dilakukan upaya proaktif melalui koordin	Kegiatan meminta izin pelaksanaan kegiatan Aktualisasi memperkuat nilai <b>Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompete</b>

							asi langsung untuk memastikan kelengkapan data terpenuhi.	n, Harmonis, Adaptif, Kolaboratif
		2. Menyusun formulir pengumpulan data dalam bentuk MS Excel & Membuat serta mengirimkan surat/undangan permintaan data ke OPD terkait	Tersedianya formulir pengumpulan data dalam bentuk MS Excel, undangan dan SS pengiriman surat/undangan permintaan data ke OPD terkait via Whatsapp	<p><b>Akuntabel:</b> Saya memastikan surat permintaan data dibuat resmi dan terdokumentasi sesuai tata naskah dinas</p> <p><b>Loyal:</b> Saya mematuhi prosedur administratif dalam pengiriman surat kepada OPD.</p> <p><b>Harmonis:</b> Saya menyusun instruksi yang jelas dan sopan untuk menjaga hubungan baik antar OPD.</p> <p><b>Kolaboratif:</b> Saya mengajak OPD berpartisipasi secara aktif melalui formulir yang mudah diisi.</p>		TIDAK		
		3. Merekap Data Kependudukan OPD ke dalam Spreadsheet	Tersedianya rekapan data kependudukan OPD ke dalam spreadsheet	<p><b>Berorientasi Pelayanan:</b> Saya memastikan data yang dikumpulkan valid sebagai dasar kebijakan.</p> <p><b>Akuntabel:</b> Saya menyediakan wadah penyimpanan bersama agar data</p>		TIDAK		

				tersimpan rapi dan dapat diakses pihak terkait. <b>Adaptif:</b> Saya menyesuaikan format dan instruksi agar OPD mudah menyerahkan data. <b>Harmonis:</b> Saya menjaga komunikasi baik dengan petugas OPD selama proses pengumpulan <b>Kolaboratif:</b> Saya bekerja sama dengan OPD lain dalam proses pengumpulan data				
		4. Menyusun tabel rekap data awal untuk PJK	Tersedianya tabel kompilasi data kependudukan dasar.	<b>Kompeten:</b> Saya menggunakan kemampuan analisis untuk mengolah data menjadi lebih terstruktur. <b>Akuntabel:</b> Saya menyusun tabel rekap yang rapi, jelas, dan siap dipakai sebagai dasar perencanaan dan siap dipertanggungjawabkan. <b>Loyal:</b> Saya mendukung target RPJMD dan visi pembangunan daerah melalui data yang terintegrasi. <b>Kolaboratif:</b> Saya hasil rekap dapat dipakai bersama oleh OPD lain sebagai acuan awal.		TIDAK		
3	Melakukan Konsultasi & Koordinasi dengan OPD Kunci	1. Menyiapkan Data Kolom PSRI (Pressure–State–Response–Impact) untuk Dokumen PJK	Tersedianya tabel PSRI dokumen	<b>Kompeten:</b> Saya menyiapkan kolom PSRI untuk setiap indikator dengan memahami konsep dasar PSRI sehingga data dapat dianalisis secara tepat.	Disdukcapil, DPPKB, Bapelitb	TIDAK		Kegiatan meminta izin pelaksanaan

				<p><b>Berorientasi Pelayanan:</b> Saya menyusun kolom PSRI secara rapi, sistematis, dan mudah dipahami agar memudahkan proses analisis dan mendukung penyusunan dokumen PJKP yang lebih berkualitas.</p> <p><b>Akuntabel:</b> Saya mendokumentasikan seluruh kolom PSRI secara lengkap dan jelas di dalam spreadsheet sebagai bentuk pertanggungjawaban atas proses penyusunan data yang transparan dan dapat ditelusuri.</p>	angda			kegiatan Aktualisasi memperkuat nilai <b>Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif, Kolaboratif</b>
		2. Melakukan konsultasi dengan OPD kunci (DPPKB) mengenai PSRI tiap indikator	Tersedianya Data PSRI OPD Terkait	<p><b>Harmonis:</b> Saya menjaga komunikasi yang sopan saat meminta penjelasan PSRI kepada OPD.</p> <p><b>Kolaboratif:</b> Saya bekerja sama dengan DPPKB sebagai pemilik substansi agar PSRI tiap indikator sesuai kebutuhan data.</p> <p><b>Loyal:</b> Saya melakukan konsultasi ini untuk mendukung penyempurnaan dokumen PJKP sebagai bagian dari komitmen terhadap arah kebijakan dan tujuan organisasi.</p> <p><b>Adaptif:</b> Saya menyesuaikan metode konsultasi dengan kondisi yang ada, termasuk memanfaatkan kesempatan ketika OPD sedang berada di kantor Bapelitbangda sehingga koordinasi dapat dilakukan secara efektif.</p> <p><b>Kompeten:</b></p>		TIDAK		

				Saya memahami konsep PSRI sehingga dapat mendiskusikan indikator dengan tepat sesuai konteks kependudukan.				
		3. Membuat catatan hasil konsultasi	Catatan hasil konsultasi (berita acara/notulen singkat).	<p><b>Akuntabel:</b> Saya mencatat hasil konsultasi secara lengkap dan terdokumentasi.</p> <p><b>Kompeten:</b> Saya mencatat poin penting yang substantif dan relevan dengan penyusunan PJP.</p> <p><b>Berorientasi Pelayanan:</b> Saya menjadikan catatan hasil konsultasi sebagai masukan untuk perbaikan kebijakan kependudukan.</p> <p><b>Kolaboratif:</b> Saya membagikan hasil catatan konsultasi kepada mentor/atasan untuk memastikan keterhubungan</p>		TIDAK		
4	Mengkaji PJPK Daerah Lain & Melaksanakan Sharing Session Internal di Bapelitbangda	1. Mengkaji dokumen PJPK provinsi/kabupaten lain	Tersedianya Ringkasan hasil kajian dokumen PJPK daerah lain	<p><b>Kompeten:</b> Saya mendalami isi dokumen PJPK untuk memahami indikator dan strategi yang digunakan daerah lain</p> <p><b>Adaptif:</b> Saya menyesuaikan pembelajaran dari daerah lain dengan kondisi Kabupaten Padang Pariaman.</p> <p><b>Loyal:</b> Saya menjadikan hasil kajian ini sebagai upaya mendukung penyusunan PJPK yang selaras dengan RPJMD dan visi nasional.</p> <p><b>Akuntabel:</b> Saya membuat ringkasan hasil kajian secara tertulis sehingga dapat</p>	Bapelitbangda, mentor, staf internal	TIDAK		Kegiatan meminta izin pelaksanaan kegiatan Aktualisasi memperkuat nilai <b>Berorientasi Pelayanan, Akuntabel,</b>

				dipertanggungjawabkan <b>Berorientasi Pelayanan:</b> Saya menjadikan kajian ini sebagai dasar peningkatan kualitas perencanaan kependudukan.				<b>Kompeten, Harmonis, Adaptif, Kolaboratif</b>
		2. Melaksanakan <i>Sharing session</i> internal di Bapelitbangda	Tersedianya Catatan hasil diskusi internal	<b>Harmonis:</b> Saya menjaga suasana diskusi agar kondusif dan menghargai pendapat rekan kerja <b>Kolaboratif:</b> Saya membagikan hasil kajian kepada rekan kerja untuk memperkaya pemahaman bersama <b>Berorientasi Pelayanan:</b> Saya memastikan diskusi menghasilkan masukan yang bermanfaat bagi perbaikan perencanaan kependudukan. <b>Akuntabel:</b> Saya mendokumentasikan hasil sharing session sebagai bukti kegiatan dan bahan pertanggungjawaban. <b>Loyal:</b> Saya berbagi pengetahuan demi mendukung pencapaian tujuan organisasi dan visi pembangunan nasional.		TIDAK		
		3. Menyusun catatan pembelajaran & rekomendasi awal tentang PJPk	Tersedianya Catatan ringkasan pembelajaran dan rekomendasi	<b>Kompeten:</b> Saya mengolah hasil kajian dan diskusi menjadi rekomendasi yang relevan dan aplikatif. <b>Akuntabel:</b> Saya menyusun catatan pembelajaran secara sistematis agar jelas dan bisa		TIDAK		

			awal untuk penyusunan PJPk.	dipertanggungjawabkan. <b>Loyal:</b> Saya memastikan rekomendasi yang dibuat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional. <b>Berorientasi Pelayanan:</b> Saya memastikan rekomendasi yang dihasilkan bermanfaat bagi penyusunan PJPk <b>Kolaboratif:</b> Saya mengkomunikasikan rekomendasi ini kepada mentor dan atasan untuk mendapatkan masukan				
5.	Melakukan Penyusunan Draft Awal Kerangka PJPk Kabupaten Padang Pariaman	1. Mengolah hasil data & konsultasi dengan OPD	Tersedianya Dokumen olahan data dan poin masukan hasil konsultasi OPD.	<b>Kompeten:</b> Saya menganalisis data dan masukan dari OPD untuk menghasilkan informasi yang relevan. <b>Akuntabel:</b> Saya memastikan setiap data dan masukan yang digunakan jelas sumbernya dan terdokumentasi. <b>Adaptif:</b> Saya menyesuaikan olahan data dengan format yang dibutuhkan untuk penyusunan PJPk. <b>Kolaboratif:</b> Saya menggunakan masukan OPD sebagai bagian dari hasil olahan data. <b>Berorientasi Pelayanan:</b> Saya menyajikan hasil olahan data untuk mendukung perencanaan berbasis evidence	Bapelitbangda, OPD terkait, mentor	TIDAK		Kegiatan meminta izin pelaksanaan kegiatan Aktualisasi memperkuat nilai <b>Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmoni</b>

		2. Menyusun draft awal PJPk	Tersedianya Draft awal kerangka PJPk (latar belakang, dasar hukum, tujuan, sasaran, serta data awal hasil kompilasi).	<p><b>Berorientasi Pelayanan:</b> Saya memastikan draft PJPk dapat menjadi pedoman arah pembangunan kependudukan daerah</p> <p><b>Kompeten:</b> Saya menggunakan keahlian perencanaan untuk merumuskan dokumen awal PJPk yang sistematis.</p> <p><b>Akuntabel:</b> Saya menyusun draft awal berbasis data dan masukan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p><b>Loyal:</b> Saya mendukung target RPJMD dan RPJPN melalui penyusunan draft PJPk.</p> <p><b>Adaptif:</b> Saya menyesuaikan draft dengan kebijakan terbaru serta dinamika data kependudukan.</p>		TIDAK		<b>S, Adaptif, Kolaboratif</b>
		3. Melaksanakan Review bersama mentor & atasan	Tersedianya Catatan hasil review dan perbaikan draft PJPk	<p><b>Harmonis:</b> Saya menghargai dan menerima masukan dari mentor dan atasan dengan sikap terbuka.</p> <p><b>Kolaboratif:</b> Saya melibatkan mentor dan atasan untuk memperbaiki kualitas draft PJPk.</p> <p><b>Adaptif:</b> Saya menyesuaikan draft berdasarkan masukan yang diberikan.</p> <p><b>Akuntabel:</b> Saya merevisi draft sesuai masukan dan mendokumentasikan perubahan yang dilakukan.</p> <p><b>Loyal:</b></p>		TIDAK		

				<p>Saya memastikan draft yang dihasilkan selaras dengan visi pembangunan nasional dan daerah.</p> <p><b>Berorientasi Pelayanan:</b> Saya menjadikan hasil review sebagai sarana peningkatan kualitas draft PJPk agar lebih bermanfaat.</p>				
		4.Membuat finalisasi draft awal PJPk	<p>Tersedianya draft awal PJPk 2025-2029 Kabupaten Padang Pariaman.</p>	<p><b>Kompeten:</b> Saya menyusun draft final awal dengan menerapkan prinsip evidence-based planning.</p> <p><b>Adaptif:</b> Saya menyesuaikan finalisasi draft dengan dinamika data dan kebijakan terbaru.</p> <p><b>Loyal:</b> Saya menjaga agar finalisasi draft selaras dengan target RPJMD, dan visi Indonesia Emas 2045.</p> <p><b>Berorientasi Pelayanan:</b> Saya menghasilkan finalisasi draft awal PJPk sebagai dokumen dasar yang dapat menjadi rujukan penyusunan regulasi kabupaten.</p> <p><b>Kolaboratif:</b> Saya memastikan finalisasi draft dilakukan dengan melibatkan OPD, mentor, dan atasan untuk menjamin kualitas dan kelengkapan.</p>		TIDAK		

**C. Matrik Rekapitulasi Pelaksanaan Habitiasi NND PNS (BerAKHLAK)**


**Tabel 4. 3Matriks Rekapitulasi Habitiasi (BerAKHLAK)**

NO.	Mata Pelatihan	Kegiatan										Jumlah Aktualisasi per Mata Pelatihan	
		Ke-1		Ke-2		Ke-3		Ke-4		Ke-5		Rencana	Realisasi
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi		
	Berorientasi Pelayanan	1	1	1	1	2	2	3	3	4	4	11	11
	Akuntabel	3	3	4	4	2	2	3	3	3	3	15	15
	Kompeten	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3	12	12
	Harmonis	2	3	3	3	1	1	1	1	1	1	8	9
	Loyal	1	1	2	2	1	1	3	3	3	3	10	10
	Adaptif	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	8	8
	Kolaboratif	1	2	4	4	2	2	2	2	3	3	12	13
	Jumlah mata pelatihan yang diaktualisasikan per kegiatan	11	11	17	17	12	12	15	15	21	21	76	78

## D. Capaian Penyelesaian Core Isu

Tabel 4. 4Capaian Penyelesaian Core Isu

<b>Kondisi Core Isu</b>	
<b>Sebelum Aktualisasi</b>	<b>Sesudah Aktualisasi</b>
<p>Sebelum dilakukan aktualisasi, proses penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di Kabupaten Padang Pariaman menghadapi berbagai kendala yang bersifat mendasar. Belum tersedianya dokumen PJPK yang terstruktur menyebabkan arah pembangunan kependudukan tidak memiliki pedoman teknis yang jelas. Selain itu, penyebaran informasi kependudukan antar-OPD masih bersifat parsial sehingga data yang dihasilkan tidak terintegrasi dan sulit digunakan untuk proses perencanaan. Kondisi ini berdampak pada lambatnya penyusunan dokumen strategis dan lemahnya analisis masalah kependudukan. Selain itu, koordinasi lintas-OPD belum berjalan efektif karena masing-masing perangkat daerah belum memiliki acuan bersama dalam penyediaan data, definisi indikator, serta penyalarsan program. Lemahnya komunikasi dan belum adanya PSRI (Pressure–State–Response–Impact) per indikator menyebabkan proses identifikasi masalah tidak komprehensif. Terbatasnya kapasitas SDM dalam memahami substansi GDPK dan PJPK juga menjadi kendala, sehingga proses penyusunan dokumen belum dapat berjalan optimal.</p>	<p>Sesudah dilakukan aktualisasi dengan gagasan kreatif “Optimalisasi Penyusunan PJPK melalui Kompilasi Data Kependudukan dan Penguatan Koordinasi antar-OPD”, berbagai langkah perbaikan telah dilakukan secara terarah. Penulis berhasil menyusun daftar indikator kependudukan beserta pemetaan OPD penyedia data, menyusun formulir pengumpulan data, dan menghimpun data kependudukan dari OPD terkait secara lebih sistematis. Melalui konsultasi dengan OPD kunci dan penyusunan tabel PSRI, analisis indikator menjadi lebih komprehensif dan menggambarkan kondisi kependudukan secara lebih nyata. Proses koordinasi lintas-OPD juga meningkat melalui mekanisme konsultasi, sharing session internal, serta penyalarsan indikator prioritas untuk penyusunan PJPK. Selain itu, penulis berhasil menyusun draft awal PJPK yang memuat analisis PSRI, rekomendasi kebijakan, serta arah pembangunan kependudukan daerah. Kegiatan ini memperkuat tata kelola perencanaan kependudukan dan mendukung penerapan nilai ASN BerAKHLAK, terutama Akuntabel, Kompeten, Adaptif, dan Kolaboratif.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Sebelum</b></p> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;">SALINAN</div> </div> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 153 TAHUN 2024 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akses pasar dan memberikan kenyamanan, kesamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat diperlukan adanya penyelenggaraan jaminan produk halal yang profesional, efektif, dan efisien;</p> <p>b. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalitas, efektifitas, dan efisiensi penyelenggaraan jaminan produk halal perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Sesudah</b></p> 

## E. Manfaat terselesainya Core Isu

Dengan terselesainya core isu ini memberikan manfaat terhadap beberapa pihak, diantaranya yaitu:

### 1) Individu Peserta

Bagi peserta, penyelesaian core isu memberikan manfaat langsung berupa peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengaktualisasian nilai-nilai BerAKHLAK dalam konteks perencanaan pembangunan kependudukan.

Melalui rangkaian kegiatan seperti kompilasi data, koordinasi antar-OPD, konsultasi substansi PSRI, dan penyusunan draft awal PJK, peserta mengembangkan kemampuan berpikir analitis, bekerja kolaboratif, dan bertindak akuntabel terhadap data dan informasi yang dikelola.

Peserta juga memperoleh pengalaman nyata dalam menggunakan pendekatan berbasis data (evidence-based planning) serta menunjukkan nilai Berorientasi Pelayanan dengan menyediakan data dan dokumen yang lebih terstruktur bagi instansi. Nilai Kompeten dan Adaptif tercermin dari kemampuan peserta memahami substansi GDPK–PJK serta menyesuaikan diri dengan dinamika data dan kebutuhan informasi dari OPD penyedia data.

Melalui proses ini, peserta menjadi lebih terampil, percaya diri, dan siap menjalankan peran sebagai ASN perencana pembangunan yang profesional dan responsif terhadap perubahan. Instansi Kerja.

## **2) Instansi Kerja (Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman)**

Penyelesaian core isu ini memberikan manfaat signifikan bagi Bapelitbangda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah. Dengan tersusunnya kompilasi data kependudukan, tabel PSRI, serta draft awal PJKP, instansi kini memiliki dasar data yang lebih lengkap, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses koordinasi lintas-OPD menjadi lebih efektif karena telah tersedia daftar indikator, formulir pengumpulan data, dan catatan konsultasi yang dapat digunakan sebagai acuan bersama. Dokumen-dokumen ini membantu mempercepat proses penyelarasan program kependudukan dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renja Perangkat Daerah, serta laporan evaluasi pembangunan.

Selain itu, tersedianya draft awal PJKP memperkuat posisi Bapelitbangda sebagai instansi yang adaptif, akuntabel, dan berkomitmen pada peningkatan kualitas tata kelola perencanaan. Kegiatan ini secara langsung mendukung visi Kabupaten Padang Pariaman untuk mewujudkan pembangunan yang terarah dan berbasis data sesuai prinsip Good Governance.

## **3) Stakeholder (OPD Penyedia Data & Masyarakat)**

Bagi stakeholder, khususnya OPD penyedia data seperti Disdukcapil, DPPKB, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan DINSOSP3A, kegiatan aktualisasi ini memberikan manfaat berupa tersedianya mekanisme kompilasi data yang lebih rapi dan mudah digunakan.

Penyusunan PSRI dan klarifikasi indikator membantu OPD memahami posisi dan peran masing-masing dalam pembangunan kependudukan, sehingga memperkuat kolaborasi lintas-sektor.

Masyarakat sebagai penerima manfaat akhir juga turut merasakan dampaknya. Dengan adanya dasar data yang lebih valid, proses perumusan kebijakan dan program pembangunan kependudukan menjadi lebih tepat sasaran, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan penduduk.

Dalam jangka panjang, penyusunan PJKP yang terarah akan mendukung pencapaian target pembangunan daerah, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pemanfaatan bonus demografi secara optimal.

Secara keseluruhan, terselesaikannya core isu ini tidak hanya memberikan dampak internal bagi instansi, namun juga memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, dan masyarakat dalam membangun tata kelola kependudukan yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan.

#### **F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi**

Setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dasar CPNS, maka rencana tindak lanjut hasil aktualisasi yang akan penulis lakukan sebagai berikut :

**Tabel 4. 5 Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>	<b>Durasi dan Waktu</b>	<b>Para Pihak Terlibat</b>	<b>Sumber Biaya</b>	<b>Keterangan</b>
1	Melanjutkan Finalisasi Dokumen PJKP hingga penetapan oleh Bupati dan jadi Perbup, dan membuat SK Tim untuk Menyusun Dokumen PJKP	Tersedianya Dokumen PJKP final yang telah diverifikasi, disahkan, dan ditandatangani oleh Bupati	3–6 bulan (hingga proses penetapan selesai)	Kepala bidang Sosial Budaya, Tim Penyusun PJKP, Bapelitbangda, OPD penyedia data, Bagian Hukum Setda	-	Finalisasi dilakukan melalui verifikasi data, penyempurnaan analisis, konsultasi lintas-OPD, harmonisasi dengan Bagian Hukum, hingga penyampaian ke Bupati untuk penetapan

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan aktualisasi yang dilakukan selama masa habituasi telah memberikan dampak nyata terhadap penyelesaian core issue serta penguatan kompetensi ASN sesuai nilai BerAKHLAK. Secara umum, seluruh kegiatan mencerminkan implementasi nilai-nilai dasar ASN, namun nilai **Kompeten, Akuntabel, Kolaboratif, dan Adaptif** menjadi nilai yang paling dominan dan berkontribusi besar terhadap keberhasilan pelaksanaan aktualisasi PJPk.

#### **1. Aktualisasi / Habituasi Mata Pelatihan**

##### **a) Kegiatan 1 - Konsultasi Awal & Persetujuan Mentor**

Kegiatan ini memastikan kesesuaian isu, ruang lingkup kegiatan, dan validitas rencana aktualisasi. Konsultasi awal menjadi dasar agar kegiatan berjalan terarah, legal, dan sesuai tugas Bapelitbangda.

Nilai BerAKHLAK dominan:

- Akuntabel (perencanaan jelas, hasil konsultasi terdokumentasi),
- Harmonis (komunikasi baik dengan mentor),
- Kolaboratif (diskusi dua arah untuk menyempurnakan rancangan).

##### **b) Kegiatan 2 - Kompilasi Data Kependudukan Dasar**

Kegiatan ini menghasilkan daftar indikator, pemetaan OPD penyedia data, formulir Excel, Google Drive, serta kompilasi data awal. Proses ini menumbuhkan kesadaran pentingnya validitas data, ketelitian, dan penyelarasan format antar-OPD untuk mendukung evidence-based planning.

Nilai BerAKHLAK dominan:

- Akuntabel (rekap data rapi & dapat dipertanggungjawabkan),
- Kompeten (analisis indikator dan klasifikasi data),
- Berorientasi Pelayanan (menyediakan data dasar yang bermanfaat bagi OPD lain),
- Kolaboratif (koordinasi intens dengan OPD penyedia data).

##### **c) Kegiatan 3 - Konsultasi Substansi PSRI dengan OPD Kunci**

Melalui klarifikasi substansi PSRI dengan DPPKB dan OPD terkait, penulis memperoleh pemahaman mendalam tentang Pressure–State–Response–Impact.

Tahap ini memperkuat kapasitas analitis dan memastikan kesesuaian setiap indikator dengan konteks kependudukan daerah.

Nilai BerAKHLAK dominan:

- Kompeten (analisis teknis PSRI),
- Kolaboratif (melibatkan OPD substansi),
- Loyal (mendukung penyusunan PJPk sebagai mandat daerah & nasional),
- Adaptif (menyesuaikan teknik konsultasi sesuai situasi OPD).

#### **d) Kegiatan 4 - Sharing Session Internal & Pembelajaran PJPk**

Pelaksanaan diskusi internal dan kajian PJPk daerah lain memperluas wawasan penulis mengenai metode penyusunan dokumen, struktur teknis, serta praktik baik yang relevan untuk Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini memperkuat keselarasan pemahaman antar-staf.

Nilai BerAKHLAK dominan:

- Kolaboratif (bertukar informasi dan membangun pemahaman bersama),
- Kompeten (kajian komparatif memperkuat kualitas analisis),
- Harmonis (diskusi internal yang saling menghargai).

#### **e) Kegiatan 5 - Penyusunan & Finalisasi Draft Awal PJPk**

Tahap akhir ini menghasilkan draft awal PJPk yang meliputi latar belakang, dasar hukum, tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta analisis PSRI. Proses review bersama mentor dan atasan meningkatkan kualitas dokumen sehingga lebih komprehensif dan siap dilanjutkan pada tahapan penetapan.

Nilai BerAKHLAK dominan:

- Kompeten (penyusunan dokumen perencanaan strategis),
- Akuntabel (dokumen berbasis data & bukti konsultasi),
- Adaptif (penyesuaian konten sesuai dinamika data & masukan atasan),
- Loyal (mendukung visi RPJMD & agenda nasional),
- Kolaboratif (finalisasi bersama mentor & OPD terkait).

## **2. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu**

Gagasan kreatif yang diusulkan adalah:

“Optimalisasi Penyusunan PJPk melalui Kompilasi Data Kependudukan dan Penguatan Koordinasi antar-OPD di Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman.”

Gagasan ini diwujudkan melalui 5 kegiatan inti:

- a) Konsultasi awal dan persetujuan kegiatan
- b) Kompilasi data kependudukan dasar
- c) Konsultasi substansi PSRI dengan OPD kunci
- d) Sharing session internal & kajian PJPK daerah lain
- e) Penyusunan dan finalisasi draft awal PJPK

### **3. Capaian Hasil Penyelesaian Core Isu**

Penyelesaian core isu menghasilkan capaian sebagai berikut:

- a) Tersedianya data kependudukan terstruktur dari seluruh OPD penyedia data.
- b) Tersusunnya analisis PSRI untuk 30 indikator kependudukan.
- c) Menguatnya koordinasi dan keselarasan antar-OPD dalam penyediaan data.
- d) Tersusunnya draft awal PJPK Kabupaten Padang Pariaman.
- e) Meningkatnya efektivitas tata kelola perencanaan kependudukan berbasis data.
- f) Terinternalisasinya nilai ASN BerAKHLAK dalam seluruh rangkaian kegiatan.

### **B. Rekomendasi**

#### **1) Untuk Penyelenggara Pelatihan**

Diharapkan penyelenggara pelatihan terus meningkatkan metode pembelajaran berbasis studi kasus dan praktik lapangan agar peserta semakin siap menghadapi tuntutan birokrasi modern. Pelatihan Latsar terbukti sangat membantu peserta dalam memahami nilai dasar ASN dan penguatan profesionalitas.

#### **2) Untuk Instansi Asal Peserta**

Disarankan agar Bapelitbangda:

melanjutkan penyempurnaan dan finalisasi dokumen PJPK hingga tahap penetapan oleh Bupati,

mendukung proses pemutakhiran data kependudukan secara berkala,

memberikan ruang bagi ASN untuk mengimplementasikan keterampilan analitis, koordinatif, dan berbasis data yang diperoleh selama pelatihan.

## Daftar Pustaka

1. Presiden Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2010–2035*. Jakarta: Sekretariat Negara.
2. Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. Jakarta: Sekretariat Negara.
3. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
4. Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman 2021–2025*. Parit Malintang: Bapelitbangda.
5. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. (2021). *Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*. Parit Malintang: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020). *Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana*. Jakarta: Kementerian PANRB.
7. Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana*. Jakarta: Bappenas.
8. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2023). *Modul Pelatihan Dasar CPNS: Agenda III Manajemen ASN dan Smart ASN*. Jakarta: LAN RI.

## LAMPIRAN

**Berikut LINK Output Aktualisasi Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJK) Kab. Padang Pariaman 2025-2029:**

[https://drive.google.com/file/d/1Qr0YexqM0PF16-I0pF\\_oWir5fgn--pGv/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1Qr0YexqM0PF16-I0pF_oWir5fgn--pGv/view?usp=sharing)

## Lampiran 1. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-1.

### a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

<b>Judul Kegiatan No.1</b>	Melakukan Konsultasi dengan mentor terkait rencana pelaksanaan aktualisasi
<b>Tanggal Pelaksanaan Kegiatan</b>	06 Oktober sampai dengan 10 Oktober 2025
<b>Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Eviden ce</b>	1. Tersedianya bahan konsultasi 2. Tersedianya catatan hasil konsultasi dan dokumentasi 3. Tersedianya surat persetujuan pelaksanaan Aktualisasi
<b>Uraian Kegiatan yang dilaksanakan:</b> 1. Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi Kegiatan 1 : Melakukan Konsultasi dengan mentor terkait rencana pelaksanaan aktualisasi <b>a. Mempersiapkan bahan konsultasi</b> <b>Akuntabel:</b> Saya menyiapkan bahan konsultasi secara lengkap dan terdokumentasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan. <b>Kompeten:</b> Saya menguasai substansi isu aktualisasi agar dapat menjelaskan secara runtut kepada mentor. <b>Harmonis:</b> Saya menjaga sikap sopan santun serta menghargai pendapat	

mentor dalam setiap interaksi dan membangun komunikasi yang baik.

**Kolaboratif:**

Saya membangun diskusi dua arah dengan mentor untuk menggali masukan secara terbuka demi penyempurnaan rancangan aktualisasi.

**b. Melaksanakan konsultasi dengan mentor**

**Akuntabel:**

Saya mendokumentasikan hasil konsultasi secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Kompeten:**

Saya memahami substansi diskusi sehingga masukan mentor dapat saya terapkan secara tepat.

**Berorientasi Pelayanan:**

Saya terbuka menerima saran dan kritik sebagai bahan perbaikan untuk mendukung perbaikan perencanaan kependudukan.

**Harmonis:**

Saya menjaga sikap sopan santun serta menghargai pendapat mentor dalam setiap interaksi dan membangun komunikasi yang baik.

**Kolaboratif:**

Saya membangun diskusi dua arah dengan mentor untuk menggali masukan secara terbuka demi penyempurnaan rancangan aktualisasi.

**c. Meminta persetujuan mentor terkait aktualisasi**

**Akuntabel:**

Saya memastikan surat persetujuan dibuat sesuai prosedur dan terdokumentasi resmi.

**Loyal:**

Saya mematuhi aturan organisasi dengan mengajukan surat sesuai mekanisme yang berlaku.

**Harmonis:**

Saya menjaga komunikasi baik dengan mentor dan atasan agar

proses persetujuan berjalan lancar

**Adaptif:**

Saya menyesuaikan draft aktualisasi dengan masukan dan arahan dari mentor sebelum ditetapkan, agar rencana yang dibuat lebih tepat dan kontekstual

**2. Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/evidence.**

**a). Teknik Aktualisasi**

Pada tahap ini digunakan teknik studi dokumen, analisis kebutuhan, dan komunikasi interpersonal.

Saya melakukan kajian terhadap panduan aktualisasi, ketentuan internal Bapelitbangda, serta isu-isu strategis Bidang Sosial Budaya sebagai dasar menyusun bahan konsultasi. Selanjutnya dilakukan konsultasi langsung dengan mentor untuk memperoleh arahan, klarifikasi substansi, dan penyesuaian rancangan aktualisasi.

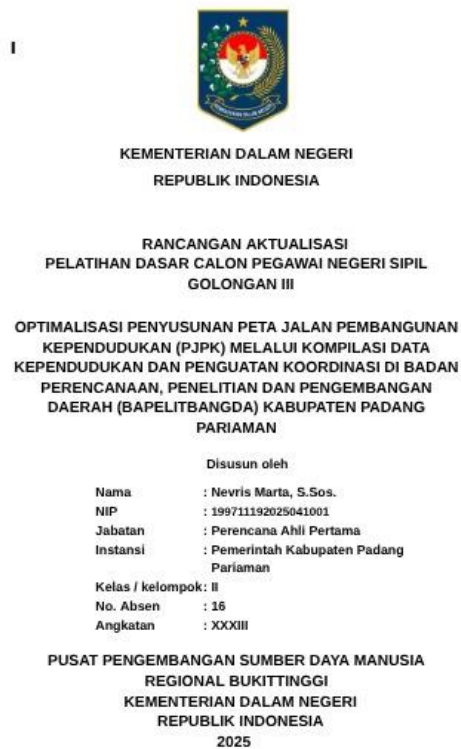
Setiap masukan dicatat dan ditindaklanjuti sebagai bentuk penyempurnaan dokumen aktualisasi sebelum masuk ke tahap pelaksanaa

**b) Bukti fisik/evidence:**

Tahapan 1.1: Mempersiapkan bahan Konsultasi



Output 1.1 : Gambar 2. Tersedianya Bahan Konsultasi (Rancangan Aktualisasi)




Tahapan 1.2: Melakukan Konsultasi dengan Mentor



Output 1.2: Gambar 4. Tersedianya catatan hasil konsultasi


Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta	: Nevris Marta, S.Sos.			
Satuan Kerja	: BAPELITBANGDA Kabupaten Padang Pariaman			
Tempat Aktualisasi	: BAPELITBANGDA Kabupaten Padang Pariaman			
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Paraf Mentor
1.	10 okt 20	Tidak melakukan konsultasi dan meminta persetujuan	Surat izin Petarjamahan Aktualisasi	
2.				
3.				
4.				
5.				

Tahapan 1.3: Meminta Persetujuan mentor terkait aktualisasi



## Output 1.3: Tersedianya surat persetujuan pelaksanaan aktualisasi

 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PARTI MALINTANG KECAMATAN ENAM LINGKUNG**  
Email : [bapelitbangdapadangpariaman01@gmail.com](mailto:bapelitbangdapadangpariaman01@gmail.com), Website : [bapelitbangda.padangpariaman.go.id](http://bapelitbangda.padangpariaman.go.id)

---

**SURAT IZIN PELAKSANAAN AKTUALISASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zuinna Marlius, SKM., M.Kes  
NIP : 19830208 200501 2 007  
Pangkat/Golongan : Pembina / IV.a  
Jabatan : Kepala Bidang Sosial Budaya  
Unit Kerja : Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman

selaku Mentor dalam kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan XXXIII Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dengan ini mengizinkan dan menyetujui pelaksanaan aktualisasi kepada peserta di bawah bimbingan saya :


Nama : Nevris Marta, S.Sos  
NIP : 19971119 202504 1 001  
Pangkat/Golongan : Penata Muda / III.a  
Jabatan : Perencana Ahli Pertama  
Unit Kerja : Bidang Sosial Budaya Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman


untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi pada Bidang Sosial Budaya Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman dengan judul "**Optimalisasi Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Melalui Kompilasi Data Kependudukan dan Penguatan Koordinasi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Padang Pariaman**". Rancangan aktualisasi tersebut telah dikonsultasikan dan relevan dengan tugas jabatan, kebutuhan unit kerja, serta mendukung penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 6 Oktober 2025  
Mengetahui,  
KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA  
BAPELITBANGDA KABUPATEN PADANG  
PARIAMAN

KEPALA BAPELITBANGDA  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

  
**ZUINNA MARLIUS, SKM., M.Kes.**  
Pembina / IV.a  
NIP. 19830208 200501 2 007

  
**Zuinna Marlius, S.T., M.Eng.**  
Penata Muda / IV.c  
NIP. 19971119 202504 1 005

### 3. Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan

#### a. Mempersiapkan Bahan Konsultasi

Pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025, saya mempersiapkan bahan konsultasi yang akan digunakan dalam pertemuan dengan mentor. Bahan yang disiapkan meliputi rancangan awal kegiatan aktualisasi, identifikasi isu di lingkungan kerja, serta alternatif solusi yang dapat diangkat sebagai inovasi. Proses penyusunan bahan dilakukan secara teliti agar informasi yang disampaikan bersifat akurat, relevan, dan mudah dipahami oleh mentor.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses konsultasi berjalan efektif, sehingga mendapatkan masukan yang tepat dalam penyempurnaan rancangan aktualisasi. Output dari tahapan ini adalah tersedianya bahan konsultasi yang siap digunakan dalam

diskusi bersama mentor.

**b. Melaksanakan konsultasi dengan mentor**

Pada hari yang sama, saya melakukan konsultasi dengan Ibu Zuinna Marlius, SKM., M.Kes., selaku Kepala Bidang Sosial Budaya Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman sekaligus mentor aktualisasi saya. Kegiatan ini berlangsung di ruang kerja beliau.

Dalam kegiatan tersebut, saya menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan aktualisasi serta menjelaskan rencana kegiatan yang telah saya susun. Dengan komunikasi yang baik dan terbuka, mentor memberikan berbagai masukan terkait fokus isu yang diangkat, langkah-langkah kegiatan, serta penyesuaian waktu pelaksanaan agar lebih realistis.

Melalui diskusi ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah pelaksanaan aktualisasi. Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan persetujuan dan penyempurnaan rencana kegiatan aktualisasi berdasarkan saran mentor.

**c. Meminta persetujuan mentor terkait aktualisasi**

Setelah mendapatkan masukan dan arahan dari hasil konsultasi sebelumnya, saya kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan permohonan persetujuan kepada Ibu Zuinna Marlius, SKM., M.Kes. selaku mentor. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, bertempat di ruang kerja mentor di Bidang Sosial Budaya Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman.

Pada tahap ini, saya menyampaikan kembali hasil penyempurnaan rancangan aktualisasi sesuai dengan masukan yang telah diberikan sebelumnya. Saya menjelaskan perubahan yang dilakukan, mulai dari penyesuaian rumusan isu, tujuan kegiatan, hingga rencana pelaksanaan yang lebih terukur. Setelah menelaah kembali dokumen aktualisasi tersebut, mentor menyatakan bahwa rancangan telah sesuai dan layak untuk dilanjutkan ke tahap pelaksanaan.

Kegiatan ini menghasilkan surat persetujuan pelaksanaan aktualisasi yang ditandatangani oleh mentor sebagai bukti legal formal bahwa

rancangan aktualisasi telah disetujui. Dengan adanya surat persetujuan ini, saya dapat melaksanakan kegiatan aktualisasi secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kualitas produk kegiatan ini terlihat dari tersusunnya bahan konsultasi yang lengkap, catatan hasil konsultasi yang terdokumentasi, serta arah penyempurnaan aktualisasi yang lebih jelas dan terukur sesuai kebutuhan organisasi.

#### **4. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tugas organisasi.**

Kegiatan kompilasi data kependudukan ini sangat penting untuk mendukung tugas Bapelitbangda dalam menyusun dokumen perencanaan berbasis data. Data yang telah direkap memberikan gambaran awal kondisi kependudukan daerah dan membantu memastikan bahwa penyusunan PJPk didasarkan pada informasi yang akurat.

Hal ini berkontribusi pada pencapaian visi daerah “Padang Pariaman Maju dan Sejahtera” melalui penyediaan data yang relevan untuk perumusan kebijakan pembangunan. Dari sisi misi organisasi, kegiatan ini memperkuat koordinasi antar-OPD, mendukung penerapan tata kelola perencanaan yang transparan, serta meningkatkan kualitas layanan perencanaan pembangunan.

#### **5. Analisis dampak jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS (Nilai Dasar ASN)**

##### **a. Dampak terhadap Satuan Kerja**

Jika proses rekap data tidak menerapkan nilai BerAKHLAK, maka data yang dikumpulkan dapat menjadi tidak konsisten, tidak lengkap, dan tidak dapat digunakan dalam penyusunan PJPk.

Kurangnya kompetensi dan akuntabilitas dapat menyebabkan kesalahan dalam rekap data, sementara koordinasi yang tidak harmonis dapat mempersulit OPD dalam menyampaikan data.

Akibatnya, kualitas perencanaan di Bapelitbangda akan menurun.


**b. Dampak terhadap Masyarakat**

Data kependudukan yang tidak akurat akan menghasilkan perencanaan yang kurang tepat sasaran. Program pembangunan menjadi tidak sesuai kebutuhan masyarakat dan efektivitas intervensi pemerintah menurun.

Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dasar perencanaannya tidak kuat.

**b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor**

**Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor**

Nama Peserta		: Nevris Marta, S.Sos.		
Satuan Kerja		: BAPELITBANGDA Kabupaten Padang Pariaman		
Tempat Aktualisasi		: BAPELITBANGDA Kabupaten Padang Pariaman		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Paraf Mentor
1.	10 okt 25	Telah melakukan konsultasi dan menuntz perseyuan	Surat izin Pelaksanaan Aktualisasi	
2.				
3.				
4.				
5.				

**c) Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach**

<b>Nama Peserta</b>		<b>: Nevris Marta, S.Sos.</b>			
<b>Satuan Kerja</b>		<b>: PEMERINTAH KAB. PADANG PARIAMAN</b>			
<b>Tempat Aktualisasi</b>		<b>: BAPELITBANGDA BIDANG Sosial dan Budaya</b>			
<b>No</b>	<b>Tanggal/Waktu</b>	<b>Catatan Bimbingan</b>	<b>Hasil capaian/output</b>	<b>Media Komunikasi (Telpo n/WA/ L/ Email/ dll)</b>	<b>Paraf Coach</b>
<b>1</b>					
<b>2</b>					
<b>3</b>					


## Lampiran 2. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke. 2.

### a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

<b>Judul Kegiatan No 1</b>	<b>Melakukan Kompilasi Data Kependudukan Dasar</b>
<b>Tanggal Pelaksanaan Kegiatan</b>	13 Oktober sampai dengan 24 Oktober 2025
<b>Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Eviden ce</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya daftar indikator dan daftar OPD yang relevan.</li> <li>2. Tersedianya formulir pengumpulan data dalam bentuk MS Excel, undangan dan SS pengiriman surat/undangan permintaan data ke OPD terkait via Whatsapp</li> <li>3. Tersedianya rekapan data kependudukan OPD ke dalam spreadsheet</li> <li>4. Tersedianya tabel kompilasi data kependudukan dasar.</li> </ol>
<p><b>Uraian Kegiatan yang dilaksanakan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi           <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan 1 : <b>Melakukan Kompilasi Data Kependudukan Dasar</b></li> <li><b>a. Mengidentifikasi Sumber data (indikator kependudukan) &amp; OPD penyedia data</b></li> <li><b>Harmonis:</b> Saya membangun komunikasi baik dengan OPD penyedia data.</li> <li><b>Kompeten:</b> Saya menggunakan kemampuan analisis untuk menentukan</li> </ul> </li> </ol>	

indikator kependudukan yang relevan.

**Akuntabel:**

Saya mencatat hasil identifikasi secara tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan.

**Kolaboratif:**

Saya melibatkan OPD terkait sejak tahap identifikasi agar proses berjalan kolaboratif

**b. Menyusun formulir pengumpulan data dalam bentuk MS Excel & Membuat serta mengirimkan surat/undangan permintaan data ke OPD terkait**

**Akuntabel:**

Saya memastikan surat permintaan data dibuat resmi dan terdokumentasi sesuai tata naskah dinas

**Loyal:**

Saya mematuhi prosedur administratif dalam pengiriman surat kepada OPD.

**Harmonis:**

Saya menyusun instruksi yang jelas dan sopan untuk menjaga hubungan baik antar OPD.

**Kolaboratif:**

Saya mengajak OPD berpartisipasi secara aktif melalui formulir yang mudah diisi.

**c. Merekap Data Kependudukan OPD ke dalam Spreadsheet**

**Berorientasi Pelayanan:**

Saya memastikan data yang dikumpulkan valid sebagai dasar kebijakan.

**Akuntabel:**

Saya menyediakan wadah penyimpanan bersama agar data tersimpan rapi dan dapat diakses pihak terkait.

**Adaptif:**

Saya menyesuaikan format dan instruksi agar OPD mudah

menyerahkan data.

**Harmonis:**

Saya menjaga komunikasi baik dengan petugas OPD selama proses pengumpulan

**Kolaboratif:**

Saya bekerja sama dengan OPD lain dalam proses pengumpulan data

**D. Menyusun tabel rekap data awal untuk PJPk**

**Kompeten:**

Saya menggunakan kemampuan analisis untuk mengolah data menjadi lebih terstruktur.

**Akuntabel:**

Saya menyusun tabel rekap yang rapi, jelas, dan siap dipakai sebagai dasar perencanaan dan siap dipertanggungjawabkan.

**Loyal:**

Saya mendukung target RPJMD dan visi pembangunan daerah melalui data yang terintegrasi.

**Kolaboratif:**

Saya hasil rekap dapat dipakai bersama oleh OPD lain sebagai acuan awal.

**2. Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/evidence.**

**a) Teknik Aktualisasi**

**1. Studi Materi & Dokumen**

Mempelajari materi PJPk yang dijelaskan mentor melalui sesi Zoom Kemendagri/Bangda, termasuk struktur PJPk, pilar, indikator, serta peran OPD penyedia data. Selain itu, saya menelaah dokumen PJPk sebelumnya dan pedoman teknis terkait data kependudukan.

**2. Identifikasi & Penyusunan Instrumen**

Mengidentifikasi indikator kependudukan dan OPD penyedia data.

Selanjutnya, saya menyusun formulir pengumpulan data dalam format Excel serta membuat surat permintaan data sebagai dasar koordinasi.

### 3. Koordinasi Digital & Rekap Data

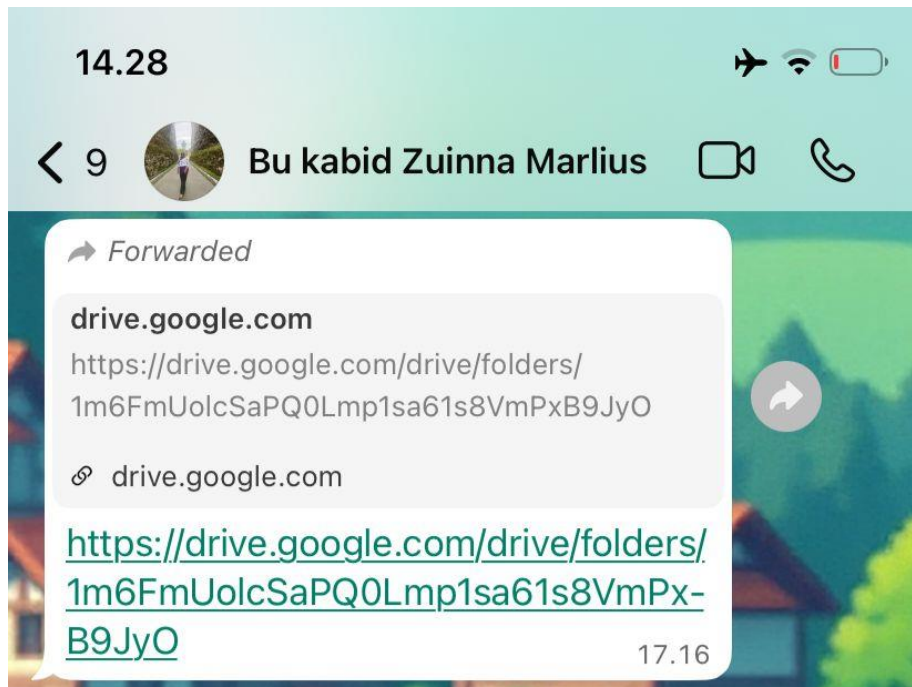
Berkoordinasi dengan OPD melalui WA/email terkait pengiriman data. Data yang diterima saya rekap ke dalam spreadsheet untuk memudahkan pengecekan dan pengelompokan per indikator.

### 4. Kompilasi dan Verifikasi Data

Melakukan pengecekan kelengkapan data, keseragaman format, serta verifikasi awal terhadap angka dan isi sebelum menyusun tabel kompilasi.

#### b) Bukti fisik/evidence:

Tahapan 2.1: Mengidentifikasi sumber data (Indikator kependudukan dan OPD penyedia data (dengan cara mempelajari Outline Dokumen PJKP dari Zoom dengan Kemendukbangga dan konsultasikan dengan Kabid)



14.28

WhatsApp



### Materi Sesi 1-4



Name



Sesi 1\_Dirrenduk\_Pengantar Konsulta...



Modified 4 Sep



Sesi 1\_Dirrenduk\_Pengantar Konsulta...



Modified 4 Sep



Sesi 1\_Materi 30 Indikator PJKP New.p...



Modified 4 Sep



Sesi 1\_Materi 30 Indikator PJKP New.p...



Modified 4 Sep



Sesi 1\_Notulen Konsultasi POPULER...



Modified 4 Sep



Sesi 2\_Progress internalisasi indikator...



Modified 4 Sep



Sesi 2\_Progress internalisasi indikator...



Modified 4 Sep



Sesi 3\_Kepmendagri Nomor 900.1-28...



Modified 4 Sep



Sesi 3\_Lina\_DirRenduk\_POPULER Ses



Modified 4 Sep



Sesi 3\_OUTLINE PJKP DAERAH.pdf



Modified 10 Oct



Sesi 4\_DITRENDUK POPULER\_Dirren...

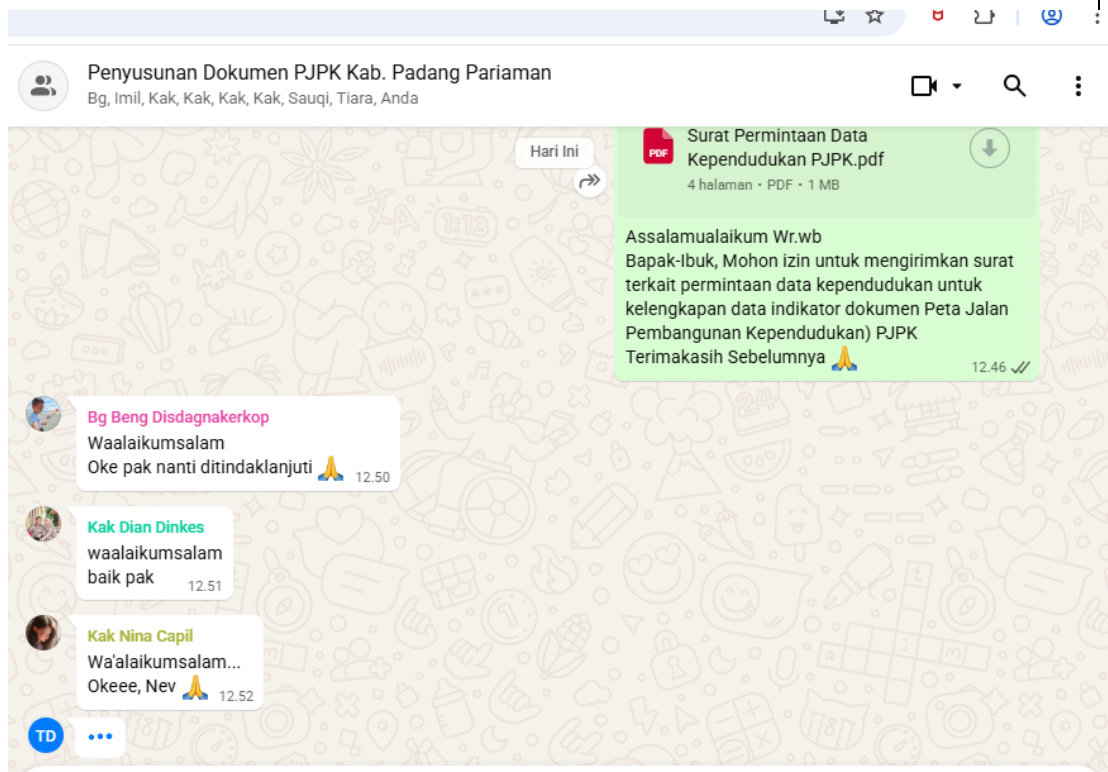


\

Output 2.1: Tersedianya Daftar Indikator dan daftar OPD yang Relevan

No	Indikator	Dinas Terkait
<b>Pengelolaan Kuantitas Penduduk</b>		
1	Total Fertility Rate (TFR)	DPPKB
2	ASFR 15-19 Tahun	DPPKB
3	Meetneed/CPR	DPPKB
4	Angka Kematian Ibu	DINKES
5	Tingkat Kemiskinan	BAPELITBANGDA
6	TPAK Wanita	DISDAGNAKERKOP
7	Persentase Pekerja Informal	DISDAGNAKERKOP
8	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	DISDAGNAKERKOP
<b>Peningkatan Kualitas Penduduk</b>		
9	Rata-Rata Lama Sekolah	DISDIKBUD
10	APK Perguruan Tinggi	DISDIKBUD
11	Penduduk Bersertifikat Keahlian	DISDAGNAKERKOP
12	Prevalensi Stunting	DINKES
13	Angka Kematian Bayi	DINKES
14	Gini Ratio	BPS
15	PDRB Per Kapita	BPS
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	BPS
17	Persen Kepemilikan NPWP	BPS
<b>Pembangunan Keluarga</b>		
18	Indeks Pembangunan Keluarga	DPPKB
19	Indeks Perlindungan Anak	DINSOSP3A
20	Rumah Tangga Akses Hunian Layak	PUPR
21	Rumah Tangga Akses Sanitasi Aman	PUPR
22	Indeks Lansia Berdaya	DPPKB
23	Indeks Pengasuhan Remaja	DINSOSP3A
24	Cakupan Kepesertaan BPJS	DINKES
<b>Pengarahannya Mobilitas Penduduk</b>		
25	Persentase Kampung KB Mandiri	DPPPA,DPPKB
26	Kepadatan Penduduk	DPPKB
<b>Penataan Administrasi Data Kependudukan</b>		
27	Kepemilikan Akta Kelahiran	DISDUKCAPIL
28	Kepemilikan Akta Cerai	DISDUKCAPIL
29	Kepemilikan Akta Nikah	DISDUKCAPIL
30	Kepemilikan Akta Kematian	DISDUKCAPIL

Tahapan 2.2 Gambar xx. Menyusun *Form* Pengumpulan Data dan Membuat serta Mengirimkan Surat Permintaan Data kepada OPD terkait





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH**  
**PARIT MALINTANG KECAMATAN ENAM LINGKUNG**  
Email : [bapelitbangpadangpariaman01@gmail.com](mailto:bapelitbangpadangpariaman01@gmail.com), Website :  
[bapelitbangda.padangpariaman.go.id](http://bapelitbangda.padangpariaman.go.id)

Parit Malintang, 9 Oktober 2025

Nomor : 050/319/Sosbud-Bapelitbangda/X/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 2 (dua) lampiran  
Perihal : **Permintaan Data  
Indikator Kependudukan**

Kepada Yth :  
Sebagaimana Terlampir  
di  
Tempat

Dalam rangka penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan, bersama ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan membutuhkan ketersediaan 30 (tiga puluh) indikator kinerja yang menggambarkan kondisi, capaian, serta target pembangunan kependudukan pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan dan kewenangannya.
2. Indikator yang dimaksud digunakan untuk:
  - a. Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kependudukan kabupaten Padang Pariaman;
  - b. penyusunan program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran PJPK; dan
  - c. konsolidasi data lintas Perangkat Daerah sebagai bahan analisis dan penyusunan dokumen PJPK Tahun 2025–2029.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk:
  - a. mengisi format 30 indikator PJPK sebagaimana terlampir, lengkap dengan data capaian dan target tahun 2025–2029;
  - b. menyesuaikan indikator dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah; dan
  - c. memastikan data telah diverifikasi secara internal
4. Data yang telah diisi agar dikirimkan melalui **Grup WhatsApp Koordinasi PJPK**.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Atas kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Bapelitbangda  
Kabupaten Padang Pariaman



**BUDI MULYA, ST., M.Eng.**  
Pembina Utama Madya (Gol.IV/c)  
NIP. 19770702 200501 1 005

**Lampiran I.**

**Daftar Perangkat Daerah**

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7. Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
8. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

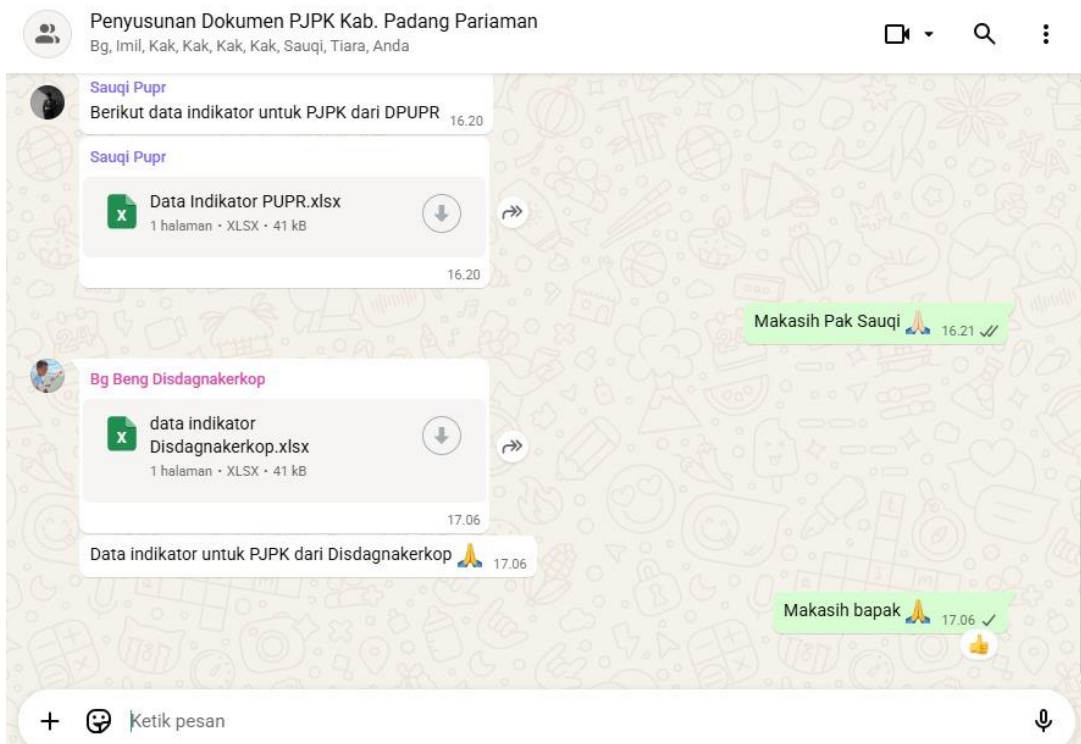
Lampiran II.

Indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan  
Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Baselin e Tahun 2024	Target							Sumbe r Data	Dinas Terkait
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
<b>I. Pengelolaan Kuantitas Penduduk</b>											
1.	Total Fertility Rate (TFR)									DPPKB	
2.	ASFR 15-19 Tahun									DPPKB	
3.	Meetneed/CPR									DPPKB	
4.	Angka Kematian Ibu									DINKES	
5.	Tingkat Kemiskinan									BAPELITBANGDA	
6.	TPAK Wanita									DISDAGNAKERKOP	
7.	Persentase Pekerja Informal									DISDAGNAKERKOP	
8.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal									DISDAGNAKERKOP	
<b>II. Peningkatan Kualitas Penduduk</b>											
9.	Rata-Rata Lama Sekolah									DISDIKBUD	
10.	APK Perguruan Tinggi									DISDIKBUD	
11.	Penduduk Bersertifikat Keahlian									DISDAGNAKERKOP	
12.	Prevalensi Stunting									DINKES	
13.	Angka Kematian Bayi									DINKES	
14.	Gini Ratio									BPS	
15.	Tingkat Pengangguran Terbuka									BPS	
16.	PDRB Per Kapita									BPS	
17.	Persen Kepemilikan									BPS	

<b>III. Pembangunan Keluarga</b>										
18.	Indeks Pembangunan Keluarga									DPPKB
19.	Indeks Perlindungan Anak									DINSOS
20.	Rumah Tangga Akses Hunian Layak									PUPR
21.	Rumah Tangga Akses Sanitasi Aman									PUPR
22.	Indeks Lansia Berdaya									DPPKB
23.	Indeks Pengasuhan Remaja									DINSOSP3A
24.	Cakupan Kepesertaan BPJS									DINKES
<b>IV. Pengarahan Mobilitas Penduduk</b>										
25.	Persentase Kampung KB Mandiri									DPPKB
26.	Kepadatan Penduduk									DPPKB
<b>V. Penataan Administrasi Data Kependudukan</b>										
27.	Kepemilikan Akta Kelahiran									DISDUKCAPIL
28.	Kepemilikan Akta Cerai									DISDUKCAPIL
29.	Kepemilikan Akta Nikah									DISDUKCAPIL
30.	Kepemilikan Akta Kematian									DISDUKCAPIL

### Tahapan/Output 2.3: OPD memberikan *feedback* Data PJKP yang Diminta



OPD yang tidak memberikan data secara Daring, diminta langsung:





## Tersedianya dokumen data kependudukan dari opd di Spreadsheet

REKAP DATA KEPENDUDUKAN SELURUH OPD .XLSX

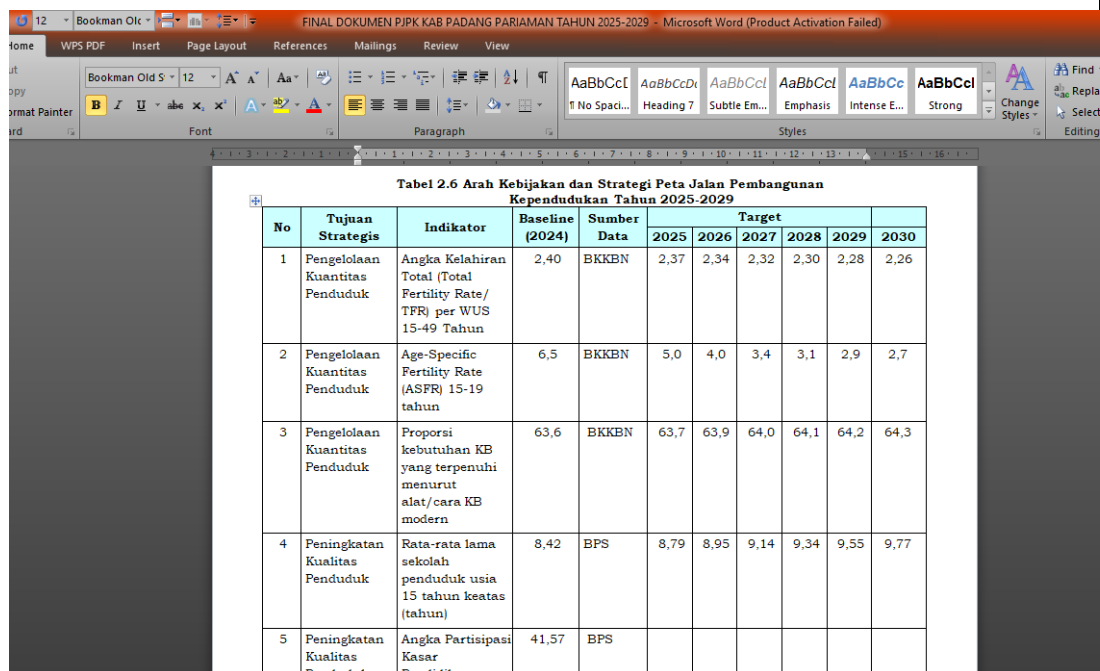
File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Bantuan

100% Arial 10

J10 Disdagnakerkop

No	Indikator	Baseline	Target					Sumber Data	Dinas Terkait	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030
<b>Pengelolaan Kuantitas Penduduk</b>										
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,40	2,37	2,34	2,32	2,30	2,28	2,26	PK 24	DPPKB
2	ASFR 15-19 Tahun	6,5	94,93	95,72	95,12	96,52	96,92	97,34	PK 24	DPPKB
3	Meetneed/CPR	65,91	63,7	63,9	64,0	64,1	64,2	64,3	PK 24	DPPKB
4	Angka Kematian Ibu	5	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	80,00	Dinkes	DINKES
5	Tingkat Kemiskinan	6,27	5,01	4,79	4,55	4,29	4,03	3,78	Bapelitbangda	BAPELITBANGDA
6	TPAK Wanita	57,53	57,53-58,91	57,84-59,45	58,14-59,99	58,45-60,53	58,75-61,07	59,06-61,61	Disdagnakerkop	DISDAGNAKERKOP
7	Persentase Pekerja Informal	68,56	68,20	67,85	67,50	67,15	66,80	66,45	Disdagnakerkop	DISDAGNAKERKOP
8	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	21,89	26,39	27,45	28,50	29,56	30,61	31,67	Disdagnakerkop	DISDAGNAKERKOP
<b>Peningkatan Kualitas Penduduk</b>										
9	Rata-Rata Lama Sekolah	8,42	8,79	8,95	9,14	9,34	9,55	9,77	BPS	DISDIKBUD
10	APK Perguruan Tinggi	100	100	100	100	100	100	100		DISDIKBUD
11	Penduduk Bersertifikat Keahlian	0,80	0,84	0,85	0,86	0,87	0,88	0,89		DISDAGNAKERKOP
12	Prevalensi Stunting	26,6	23,90	22,65	21,40	20,15	18,90	17,65	Dinkes	DINKES
13	Angka Kematian Bayi	29 Orang	0	0	0	0	0	0	Dinkes	DINKES
14	Gini Ratio	253	251	250	249	248	247	246	BPS	BPS
15	PDRB Per Kapita	58,39	57,54	70	85	102	120	140,26	BPS	BPS
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,59	6,17	5,89	5,76	5,59	5,42	5,28	BPS	BPS
17	Persen Kepemilikan NPWP		32,54	34,02	35,57	37,19	38,88	40,65	BPKD	BPS
<b>Pembangunan Keluarga</b>										
18	Indeks Pembangunan Keluarga	56,32	57,8	59,2	60,5	61,8	63,1	64,2	PK-24	DPPKB
19	Indeks Perlindungan Anak		69,68	69,87	70,05	70,24	70,42	70,61	DINSOSP3A	DINSOSP3A
20	Rumah Tangga Akses Hunian Layak	92,21	60,25	62,54	64,83	67,12	70,71	72,73	PUPR	PUPR
21	Rumah Tangga Akses Sanitasi Aman	6,34	7,62	9,33	11,09	12,86	14,62	18,62	PUPR	PUPR
22	Indeks Lansia Berdaya	57,89	65,5	66,3	67,0	67,6	68,3	68,9	PK-24	DPPKB
23	Indeks Penguasaan Remaja	79,5	81,3	82,9	84,3	85,6	86,9	88,0	PK-24	DINSOSP3A
24	Cakupan Kepesertaan BPJS	85,14	94,00	94,00	94,00	94,00	98,00	92,00	Dinas Kesehatan	DINKES
<b>Pengarahannya Mobilitas Penduduk</b>										
25	Persentase Kampung KB Mandiri	21,35	24,4	34,0	43,7	53,4	62,1	67,1	Website Kampung KB	DPPPA,DPPKB
26	Kepadatan Penduduk	340	341	347	353	359	365	372	DPPKB	DPPKB
<b>Penataan Administrasi Data Kependudukan</b>										
27	Kepemilikan Akta Kelahiran	98,35	57	59	61	63	64	65	Disdukcapil	DISDUKCAPIL
28	Kepemilikan Akta Cerai	0	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil	DISDUKCAPIL
29	Kepemilikan Akta Nikah	100	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil	DISDUKCAPIL
30	Kepemilikan Akta Kematian	100	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil	DISDUKCAPIL

## Tahapan 2.4: Rekap data Awal PJPk



No	Tujuan Strategis	Indikator	Baseline (2024)	Sumber Data	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pengelolaan Kuantitas Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) per WUS 15-49 Tahun	2,40	BKKBN	2,37	2,34	2,32	2,30	2,28	2,26
2	Pengelolaan Kuantitas Penduduk	Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	6,5	BKKBN	5,0	4,0	3,4	3,1	2,9	2,7
3	Pengelolaan Kuantitas Penduduk	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern	63,6	BKKBN	63,7	63,9	64,0	64,1	64,2	64,3
4	Peningkatan Kualitas Penduduk	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas (tahun)	8,42	BPS	8,79	8,95	9,14	9,34	9,55	9,77
5	Peningkatan Kualitas Penduduk	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan	41,57	BPS						

### 3. Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan

#### a. Mengidentifikasi Sumber data (indikator kependudukan) & OPD penyedia data

Tahapan dimulai dengan mempelajari materi PJPk dari sesi Zoom bersama mentor dan Kemendagri/Bangda. Materi tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai 30 indikator kependudukan, pilar-pilar PJPk, dan OPD penyedia data.

Berdasarkan pemahaman tersebut, saya menelusuri dokumen perencanaan sebelumnya dan menyusun daftar indikator yang relevan beserta OPD penyediannya seperti Disdukcapil, DPPKB, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan perangkat daerah lainnya.

#### b. Menyusun formulir pengumpulan data dalam bentuk MS Excel & Membuat serta mengirimkan surat/undangan permintaan data ke OPD terkait

Setelah indikator dan OPD penyedia data ditetapkan, saya menyusun formulir pengumpulan data dalam format Excel. Formulir tersebut berisi kolom indikator, satuan, nilai, tahun data, dan catatan

tambahan.

Untuk mendukung koordinasi formal, saya menyiapkan surat/undangan permintaan data yang kemudian dikirimkan melalui WA, email, atau disampaikan melalui bidang terkait.

### **C. Merekap Data Kependudukan OPD ke dalam Spreadsheet**

Data yang diterima dari OPD melalui WA/email saya input dan rekap ke dalam spreadsheet. Proses ini meliputi penyeragaman format, pemetaan indikator, pengecekan apakah data lengkap atau masih memerlukan klarifikasi, serta memberi catatan pada data yang belum valid.

### **d. Menyusun tabel rekap data awal untuk PJPk**

Pada tahap akhir, seluruh data yang telah direkap diolah menjadi tabel kompilasi data kependudukan dasar. Saya memastikan konsistensi angka, kesesuaian indikator, serta memeriksa kembali sumber data.

Tabel ini nantinya menjadi basis utama untuk penyusunan analisis PJPk pada minggu berikutnya.

Kualitas produk ditunjukkan dengan tersusunnya:

Kualitas produk kegiatan minggu kedua ditunjukkan oleh tersusunnya:

- daftar indikator kependudukan dan OPD penyedia data,
- formulir pengumpulan data yang terstruktur,
- data kependudukan dari OPD yang telah direkap,
- tabel kompilasi data kependudukan dasar yang siap digunakan pada kegiatan berikutnya.

Semua produk tersusun rapi dan terdokumentasi sebagai bagian dari penyusunan PJPk.

## **4. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tugas organisasi.**

Kegiatan ini mendukung pencapaian visi “Padang Pariaman Maju dan Sejahtera” dengan memastikan bahwa penyusunan PJKP dilakukan berdasarkan data kependudukan yang lengkap dan valid.

Dari sisi misi organisasi, kegiatan ini memperkuat tata kelola perencanaan berbasis data dan meningkatkan efektivitas koordinasi antar-OPD.

Sebagai tugas utama Bapelitbangda, kompilasi data ini menjadi fondasi penting dalam penyusunan dokumen perencanaan agar kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran dan sesuai kondisi masyarakat.

## **5. Analisis dampak jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS (Nilai Dasar ASN)**

### **a. Dampak terhadap Satuan Kerja**



Tanpa penerapan nilai BerAKHLAK, proses kompilasi data dapat menjadi tidak teratur, tidak lengkap, dan tidak valid. Kurangnya akuntabilitas dan kompetensi dapat menimbulkan kesalahan dalam rekap data. Koordinasi dengan OPD menjadi tidak lancar sehingga menghambat proses penyusunan PJKP dan menurunkan kualitas perencanaan di Bapelitbangda.

### **b. Dampak terhadap Masyarakat**

Jika data kependudukan tidak dikumpulkan secara benar, maka perencanaan pembangunan yang dihasilkan berpotensi tidak tepat sasaran. Hal ini berdampak pada pelayanan publik yang tidak efektif, intervensi pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan, dan pada akhirnya menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**b) Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor**

**Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor**

<b>Nama Peserta</b>		: Nevris Marta, S.Sos.		
<b>Satuan Kerja</b>		: BAPELITBANGDA Kabupaten Padang Pariaman		
<b>Tempat Aktualisasi</b>		: BAPELITBANGDA Kabupaten Padang Pariaman		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Paraf Mentor
1.	10 Okt 25	Telah melakukan konsultasi dan menuntz persetujuan	Surat izin Pelaksanaan Aktualisasi	
2.	24 Okt 25	Telah Mengumpulkan dan merekapkan data	Tabel rekap data awal untuk RJPK	
3.				
4.				
5.				

**c) Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach**

<b>Nama Peserta</b>		<b>: Nevris Marta, S.Sos.</b>			
<b>Satuan Kerja</b>		<b>: PEMERINTAH KAB. PADANG PARIAMAN</b>			
<b>Tempat Aktualisasi</b>		<b>: BAPELITBANGDA BIDANG Sosial dan Budaya</b>			
<b>No</b>	<b>Tanggal/Waktu</b>	<b>Catatan Bimbingan</b>	<b>Hasil capaian/output</b>	<b>Media Komunikasi (Telpo n/WA/ L/ Email/ dll)</b>	<b>Paraf Coach</b>
1					
2					

<b>3</b> .					
<b>4</b> .					

**Lampiran 1. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-3.**

**a) Tabel Pelaksanaan Aktualisasi**

<p><b>Judul Kegiatan No 1</b></p>	<p>Melakukan Konsultasi &amp; Koordinasi dengan OPD Kunci</p>
<p><b>Tanggal Pelaksanaan Kegiatan</b></p>	<p>20 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2025</p>
<p><b>Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Eviden ce</b></p>	<p>1. Menyiapkan Data Kolom PSRI (Pressure–State–Response–Impact) untuk Dokumen PJPK</p> <p>2. Melakukan konsultasi dengan OPD kunci (DPPKB) mengenai PSRI tiap indikator</p> <p>3. Membuat catatan hasil konsultasi</p>
<p><b>Uraian Kegiatan yang dilaksanakan:</b></p> <p>1. Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi Kegiatan 1 :Melakukan Konsultasi &amp; Koordinasi dengan OPD Kunci</p> <p><b>a. a. Menyiapkan Data Kolom PSRI (Pressure–State–Response–Impact)</b></p> <p><b>Kompeten:</b></p> <p>Saya menyiapkan kolom PSRI untuk setiap indikator dengan memahami konsep dasar PSRI sehingga data dapat dianalisis secara tepat.</p> <p><b>Berorientasi Pelayanan:</b></p> <p>Saya menyusun kolom PSRI secara rapi, sistematis, dan mudah dipahami agar memudahkan proses analisis dan mendukung penyusunan dokumen PJPK yang lebih berkualitas.</p> <p><b>Akuntabel:</b></p> <p>Saya mendokumentasikan seluruh kolom PSRI secara lengkap dan jelas di</p>	

dalam spreadsheet sebagai bentuk pertanggungjawaban atas proses penyusunan data yang transparan dan dapat ditelusuri.

**b. Melakukan Konsultasi dengan OPD Kunci (DPPKB) terkait PSRI tiap Indikator**

**Harmonis:**

Saya menjaga komunikasi yang sopan saat meminta penjelasan PSRI kepada OPD.

**Kolaboratif:**

Saya bekerja sama dengan DPPKB sebagai pemilik substansi agar PSRI tiap indikator sesuai kebutuhan data.

**Loyal:**

Saya melakukan konsultasi ini untuk mendukung penyempurnaan dokumen PJKP sebagai bagian dari komitmen terhadap arah kebijakan dan tujuan organisasi.

**Adaptif:**

Saya menyesuaikan metode konsultasi dengan kondisi yang ada, termasuk memanfaatkan kesempatan ketika OPD sedang berada di kantor Bapelitbangda sehingga koordinasi dapat dilakukan secara efektif.

**Kompeten:**

Saya memahami konsep PSRI sehingga dapat mendiskusikan indikator dengan tepat sesuai konteks kependudukan.

**c. Membuat catatan hasil konsultasi**

**Akuntabel:**

Saya mencatat hasil konsultasi secara lengkap dan terdokumentasi.

**Kompeten:**

Saya mencatat poin penting yang substantif dan relevan dengan penyusunan PJKP.

**Berorientasi Pelayanan:**

Saya menjadikan catatan hasil konsultasi sebagai masukan untuk perbaikan kebijakan kependudukan.

**Kolaboratif:**

Saya membagikan hasil catatan konsultasi kepada mentor/atasan untuk memastikan keterhubungan

**2. Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/evidence.****a. Teknik aktualisasi****1. Analisis Dokumen dan Studi Materi**

Saya menelaah kembali materi PJKP yang diperoleh dari sesi Zoom bersama mentor dan Kemendagri/Bangda, termasuk pemahaman tentang struktur PSRI. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa kolom PSRI yang saya siapkan sesuai dengan pedoman analisis kependudukan.\

**2. Persiapan Data PSRI**

Teknik pengolahan data digunakan untuk menyiapkan kolom PSRI (Pressure, State, Response, Impact) ke dalam spreadsheet. Saya menyiapkan rancangan awal PSRI berdasarkan data indikator minggu sebelumnya.

**3. Konsultasi Substansi dengan OPD Kunci**

Saya melakukan konsultasi substantif dengan DPPKB untuk mendapatkan penjelasan mengenai tekanan, kondisi, respons, dan dampak dari indikator kependudukan. Teknik komunikasi interpersonal dipakai agar diskusi berjalan lancar dan informasi yang diperoleh akurat.

**4. Pencatatan dan Pengelolaan Hasil Konsultasi**

Setiap masukan dicatat dalam catatan konsultasi sebagai dokumen pelengkap. Teknik dokumentasi digunakan untuk menjaga akurasi informasi yang diterima.

## b). Bukti Fisik / Evidence:

### Tahapan 3.1 Tersedianya Kolom PSRI

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled "PSRI RJPK" with a menu bar (File, Edit, Tampilan, Sisipkan, Format, Data, Alat, Bantuan) and a toolbar. The spreadsheet contains a table with the following structure:

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
1	Total Fertility Rate (TFR)				
2	ASFR 15-19 Tahun				
3	Meetneed/CPR				
4	Rata-Rata Lama Sekolah				
5	APK Perguruan Tinggi				
6	Penduduk Bersertifikat Keahlian				
7	Proyeksi Stunting				
8	Angka Kematian Bayi				
9	Angka Kematian Ibu				
10	Tingkat Kemiskinan				
11	TPAK Wanita				
12	Persentase Pekerja Informal				
13	Disabilitas Disektor Informal				
14	Gini Ratio				
15	PDRB Per Kapita				
16	Tingkat Pengangguran Terbuka				
17	Persen Kepemilikan NPWP				
18	Indeks Pembangunan Keluarga				
19	Indeks Perlindungan Anak				
20	R. Tangga Akses Hunian Layak				
21	R. Tangga Akses Sanitasi Aman				
22	Indeks Lansia Berdaya				
23	Indeks Pengasuhan Remaja				
24	Cakupan Kepesertaan BPJS				
25	Persentase Kampung KB Mandiri				
26	Rasio Migrasi Risen Netto				
27	Kepemilikan Akta Kelahiran				
28	Kepemilikan Akta Cerai				
29	Kepemilikan Akta Nikah				
30	Kepemilikan Akta Kematian				

### Tahapan 3.2 Koordinasi Data PSRI OPD dengan DPPKB



## Tahapan 3.3 Tersedianya catatan konsultasi dengan DPPKB mengenai Data PSRI

### **CATATAN KONSULTASI**

#### **Pembahasan PSRI 30 Indikator PJKP**

Waktu dan Tempat Pelaksanaan	: Selasa/ 28 Oktober 2025 di Ruang Rapat Bidang Sosial Budaya Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang
Pimpinan Rapat	: Kepala Bidang Sosial Budaya, Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman
Peserta Rapat	: 1. Ka. Bidang Sosial Budaya, Bapelitbangda Kab. Padang Pariaman. 2. Fungsional Perencana Bidang Sosial Budaya, Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman. 3. Staf Bidang Sosial Budaya, Bapelitbangda Kab. Padang Pariaman 4. Ka. Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB Kab. Padang Pariaman. 5. Fungsional/ Staf Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB Kab. Padang Pariaman.
Agenda Diskusi	: Pembahasan PSRI 30 Indikator PJKP 1. Data PSRI untuk Dokumen PJKP
<p>Pembahasan :</p> <p><b>Pokok-Pokok Pembahasan</b></p> <p><b>1. Penjelasan PSRI oleh DPPKB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan <i>Pressure</i> untuk indikator (Tekanan)</li> <li>• Penjelasan <i>State</i> berdasarkan (kondisi) lapangan</li> <li>• Penjelasan <i>Response</i> dari pemerintah daerah (rencana aksi)</li> <li>• Penjelasan <i>Impact</i> terkait (dampak) kependudukan</li> </ul> <p><b>2. Penajaman indikator kependudukan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klarifikasi definisi 30 indikator untuk tabel dokumen</li> <li>• Catatan tambahan yang perlu direvisi/dilengkapi</li> </ul> <p><b>3. Arah lanjutan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengisian kolom PSRI pada spreadsheet</li> <li>• Tindak lanjut penyempurnaan dokumen PJKP</li> </ul> <p><b>Keterangan:</b> Hasil diskusi ini digunakan sebagai dasar penyempurnaan kolom PSRI pada indikator kependudukan dan akan diintegrasikan dalam penyusunan tabel analisis PJKP.</p>	



Parit Malintang, 28 Oktober 2025

Notulen

Nevris Marta, S.Sos.  
NIP. 19971119 202504 1 001

### 3. Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan

#### a. Menyiapkan Data Kolom PSRI (Pressure–State–Response–Impact) untuk Dokumen PJKP

Tahapan dimulai dengan menyiapkan struktur kolom PSRI dalam spreadsheet untuk seluruh indikator kependudukan. Saya membuat kolom Pressure, State, Response, dan Impact berdasarkan indikator yang sudah direkap pada minggu sebelumnya.

Saya juga meninjau kembali materi PJKP yang pernah disampaikan melalui sesi Zoom Kemendagri/Bangda agar pengisian PSRI sesuai pedoman.

Persiapan ini penting agar konsultasi dengan OPD dapat berjalan sistematis dan fokus pada indikator yang membutuhkan klarifikasi.

**b. Melakukan Konsultasi dengan OPD Kunci (DPPKB) mengenai PSRI Tiap Indikator**

Selanjutnya, saya melakukan konsultasi dengan DPPKB sebagai OPD kunci untuk menjelaskan substansi PSRI tiap indikator.

Pada proses ini saya menanyakan kondisi indikator, sumber masalah (pressure), keadaan atau capaian aktual (state), program atau intervensi yang sedang berjalan (response), hingga dampak yang ditimbulkan (impact).

Diskusi dilakukan secara langsung dan berfokus pada indikator-indikator yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam. Konsultasi berlangsung baik dan memberikan banyak informasi yang memperkaya analisis PSRI.

**c. Membuat catatan hasil konsultasi**

Seluruh hasil konsultasi kemudian saya catat ke dalam lembar catatan konsultasi. Catatan ini berisi poin-poin penting seperti penjelasan kondisi indikator, klarifikasi data, rekomendasi OPD, serta catatan lanjutan untuk pembahasan berikutnya.

Catatan hasil konsultasi menjadi referensi utama dalam penyempurnaan tabel PSRI dan sangat penting untuk mendukung analisis dokumen PJPK.

Produk akhir dari tahap ini adalah catatan hasil konsultasi berupa notulen singkat atau berita acara yang mencerminkan hasil diskusi dengan OPD terkait.

Kualitas produk minggu ketiga ditunjukkan oleh:

- struktur PSRI (Pressure–State–Response–Impact) yang telah disiapkan,
- masukan substantif dari DPPKB terkait indikator kependudukan,
- catatan hasil konsultasi yang lengkap dan terdokumentasi.

Produk ini menjadi dasar analisis penting dalam penyusunan PJPK minggu selanjutnya.

#### **4. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tugas organisasi.**

Kegiatan konsultasi PSRI berkontribusi pada penguatan kualitas analisis indikator kependudukan. Informasi yang akurat dari OPD kunci menghasilkan gambaran kondisi daerah yang lebih komprehensif, sehingga mendukung penyusunan PJPK yang lebih tepat sasaran.

Kegiatan ini membantu pencapaian visi “Padang Pariaman Maju dan Sejahtera” melalui penguatan analisis berbasis data. Dari sisi misi organisasi, kegiatan ini memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan mendukung tata kelola perencanaan yang lebih responsif dan berbasis bukti.

#### **5. Analisis dampak jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS (Nilai Dasar ASN)**

##### **a. Dampak terhadap Satuan Kerja**

Jika proses penyiapan dan konsultasi PSRI tidak mengacu pada nilai BerAKHLAK, maka data yang dikumpulkan dapat tidak akurat, tidak lengkap, dan menimbulkan salah interpretasi indikator.

Kurangnya kompetensi atau komunikasi yang buruk dengan OPD dapat menghambat proses analisis, sehingga kualitas penyusunan PJPK menjadi rendah dan tidak sesuai kebutuhan daerah.




##### **b. Dampak terhadap Masyarakat**

Analisis PSRI yang tidak dilakukan dengan benar berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak menyelesaikan akar masalah kependudukan.

Akibatnya, program pemerintah berisiko tidak tepat sasaran, pelayanan publik menurun kualitasnya, dan kesejahteraan masyarakat tidak mengalami peningkatan yang berarti.

**b) Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor**

**Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor**

Nama Peserta		: Nevris Marta, S.Sos.		
Satuan Kerja		: BAPELITBANGDA Kabupaten Padang Pariaman		
Tempat Aktualisasi		: BAPELITBANGDA Kabupaten Padang Pariaman		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Paraf Mentor
1.	10 Okt 25	Telah melakukan konsultasi dan meminta persetujuan	Surat izin Pelaksanaan Aktualisasi	
2.	24 Okt 25	Telah mengumpulkan dan merekapkan data	Tabel rekap data awal untuk RJK	
3.	31 Okt 25	Telah melakukan koordinasi dengan DPPKB	Konsultasi mengenai PSL dengan DPPKB	
4.				
5.				

**c) Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach**

<b>Nama Peserta</b>		<b>: Nevris Marta, S.Sos.</b>			
<b>Satuan Kerja</b>		<b>: PEMERINTAH KAB. PADANG PARIAMAN</b>			
<b>Tempat Aktualisasi</b>		<b>: BAPELITBANGDA BIDANG Sosial dan Budaya</b>			
<b>No</b>	<b>Tanggal/Waktu</b>	<b>Catatan Bimbingan</b>	<b>Hasil capaian/output</b>	<b>Media Komunikasi (Telpo n/WA/ L/ Email/ dll)</b>	<b>Paraf Coach</b>
1					
2					

<b>3</b> .					
<b>4</b> .					

## Lampiran 1. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-4.

### a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

<b>Judul Kegiatan No 1</b>	Mengkaji PJPk Daerah Lain & Melaksanakan Sharing Session Internal di Bapelitbangda
<b>Tanggal Pelaksanaan Kegiatan</b>	27 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2025
<b>Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Eviden ce</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji dokumen PJPk provinsi/kabupaten lain</li> <li>2. Melaksanakan Sharing session internal di Bapelitbangda</li> <li>3. Menyusun catatan pembelajaran &amp; rekomendasi awal tentang PJPk</li> </ol>
<p><b>Uraian Kegiatan yang dilaksanakan:</b></p> <p><b>1. Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi</b></p> <p>Kegiatan 1 : Mengkaji PJPk Daerah Lain &amp; Melaksanakan Sharing Session Internal di Bapelitbangda</p> <p><b>a. Mengkaji dokumen PJPk provinsi/kabupaten lain</b></p> <p><b>Kompeten:</b>  Saya mendalami isi dokumen PJPk untuk memahami indikator dan strategi yang digunakan daerah lain</p> <p><b>Adaptif:</b>  Saya menyesuaikan pembelajaran dari daerah lain dengan kondisi Kabupaten Padang Pariaman.</p> <p><b>Loyal:</b>  Saya menjadikan hasil kajian ini sebagai upaya mendukung</p>	

penyusunan PJPK yang selaras dengan RPJMD dan visi nasional.

**Akuntabel:**

Saya membuat ringkasan hasil kajian secara tertulis sehingga dapat dipertanggungjawabkan

**Berorientasi Pelayanan:**

Saya menjadikan kajian ini sebagai dasar peningkatan kualitas perencanaan kependudukan.

**b. Melaksanakan Sharing session internal di Bapelitbangda**

**Harmonis:**

Saya menjaga suasana diskusi agar kondusif dan menghargai pendapat rekan kerja

**Kolaboratif:**

Saya membagikan hasil kajian kepada rekan kerja untuk memperkaya pemahaman bersama

**Berorientasi Pelayanan:**

Saya memastikan diskusi menghasilkan masukan yang bermanfaat bagi perbaikan perencanaan kependudukan.

**Akuntabel:**

Saya mendokumentasikan hasil sharing session sebagai bukti kegiatan dan bahan pertanggungjawaban.

**Loyal:**

Saya berbagi pengetahuan demi mendukung pencapaian tujuan organisasi dan visi pembangunan nasional.

**c. Menyusun catatan pembelajaran & rekomendasi awal tentang PJPK**

**Kompeten:**

Saya mengolah hasil kajian dan diskusi menjadi rekomendasi yang relevan dan aplikatif.

**Akuntabel:**

Saya menyusun catatan pembelajaran secara sistematis agar

jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

**Loyal:**

Saya memastikan rekomendasi yang dibuat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional.

**Berorientasi Pelayanan:**

Saya memastikan rekomendasi yang dihasilkan bermanfaat bagi penyusunan PJPk

**Kolaboratif:**

Saya mengkomunikasikan rekomendasi ini kepada mentor dan atasan untuk mendapatkan masukan

**2. Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/evidence.**

**a) teknik Aktualisasi**

**1. Benchmarking / Studi Banding Dokumen**

Saya menggunakan teknik kajian dokumen untuk mempelajari PJPk daerah lain (provinsi/kabupaten) sebagai acuan. Teknik ini memberi gambaran struktur, metode analisis, kerangka isi, serta contoh indikator yang telah diolah oleh daerah lain.

**2. Diskusi & Sharing Session Internal**

Teknik komunikasi kelompok digunakan saat sharing session bersama Bidang Sosial Budaya. Diskusi dilakukan untuk membandingkan struktur PJPk daerah lain dengan kebutuhan Kabupaten Padang Pariaman.

**3. Analisis & Penyusunan Rekomendasi Awal**

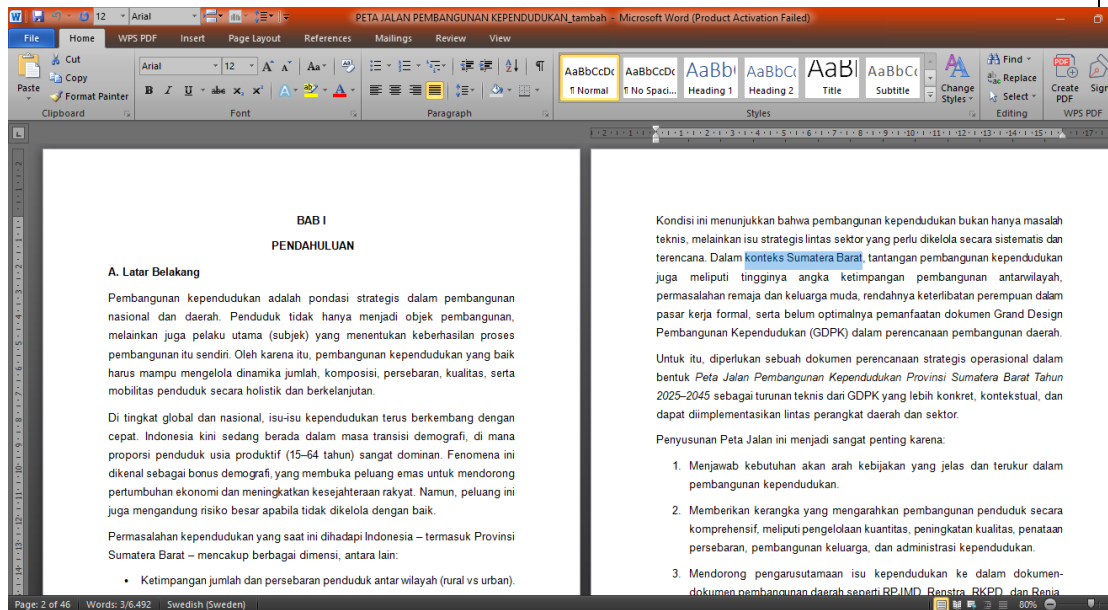
Saya menggunakan teknik analisis konten untuk merumuskan kesimpulan dari hasil kajian dokumen dan hasil diskusi, kemudian menyusunnya menjadi catatan pembelajaran.

**4. Pencatatan & Dokumentasi**

Semua pendapat, masukan, dan usulan dari sharing session didokumentasikan dalam bentuk catatan pembelajaran awal.

## B) bukti Evidence:

### Tahapan 4.1. Mengkaji dokumen PJKP Provinsi Sumatera Barat



### Output 4.2. Melaksanakan sharing session internal di bapelitbangda



## Tahapan 4.3. Catatan Konsultasi

### **CATATAN KONSULTASI**

#### **Pembelajaran dan Rekomendasi Awal tentang PJKP**

Waktu dan Tempat Pelaksanaan	: Selasa/ 31 Oktober 2025 di Ruang Rapat Bidang Sosial Budaya Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang
Pimpinan Rapat	: Kepala Bidang Sosial Budaya, Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman
Peserta Rapat	: 1. Ka. Bidang Sosial Budaya, Bapelitbangda Kab. Padang Pariaman. 2. Fungsional Perencana Bidang Sosial Budaya, Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman. 3. Staf Bidang Sosial Budaya, Bapelitbangda Kab. Padang Pariaman
Agenda Diskusi	: Pembahasan Pembelajaran dan Rekomendasi Awal tentang PJKP <b>Pembahasan dokumen PJKP sebelumnya, perubahan pilar indikator, dan penyesuaian tabel penyusunan PJKP</b>

**1. Pembelajaran dari Dokumen PJKP Sebelumnya**

- Struktur dokumen PJKP sebelumnya dianalisis untuk melihat format penulisan, susunan bab, dan indikator utama.
- Ditemukan beberapa aspek yang perlu diperbaiki, termasuk penyederhanaan narasi, peningkatan kualitas visualisasi data, serta kebutuhan memperkuat analisis PSRI.

**2. Perubahan Pilar Indikator PJKP (Dari 6 Menjadi 5 Pilar)**

- Pilar indikator PJKP yang sebelumnya berjumlah **6 pilar** kini disederhanakan menjadi **5 pilar** sesuai ketentuan terbaru.
- Perubahan ini berdampak pada:
  - penyesuaian tabel indikator,
  - pengelompokan ulang indikator per pilar,
  - penyesuaian format analisis di bagian bab utama dokumen.

**3. Penyesuaian Tabel dan Format Penyajian Data**

- Tabel indikator diperbarui menyesuaikan struktur baru, termasuk perubahan kolom, penyederhanaan layout, dan penyesuaian nomor urut.
- Spreadsheet rekap data disesuaikan dengan pilar terbaru agar konsisten dengan pedoman PJKP.
- Perlu tambahan kolom penjelasan untuk indikator tertentu yang mengalami perubahan definisi.

**4. Rekomendasi Internal**

- Melanjutkan pengisian PSRI sesuai pilar baru.
- Melakukan sinkronisasi data ulang jika terdapat indikator yang berubah lokasi pilar.
- Menyiapkan draft susunan bab PJKP berdasarkan struktur terbaru.

**Kesimpulan:**  
Rapat internal menghasilkan kesepakatan untuk menyesuaikan dokumen PJKP Kabupaten Padang Pariaman 2025 dengan format terbaru, termasuk perubahan jumlah pilar menjadi lima dan penyesuaian tabel indikator. Hasil pembahasan ini akan menjadi dasar untuk proses kompilasi data dan penyusunan draft awal PJKP.

Parit Malintang, 31 Oktober 2025



Notulen  
  
Nevrin Marta, S.Sos.  
NIP. 19971119 202504 1 001

### 3. Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan

#### a. Mengkaji dokumen PJKP provinsi/kabupaten lain

Tahap ini dimulai dengan mengumpulkan dokumen PJKP dari provinsi/kabupaten lain sebagai referensi penyusunan PJKP Kabupaten Padang Pariaman.

Saya mempelajari struktur dokumen, jumlah pilar, kerangka analisis, serta contoh indikator yang digunakan. Dari hasil kajian, terlihat bahwa terdapat perbedaan struktur, misalnya perubahan jumlah pilar dari 6 menjadi 5 pada PJPk terbaru.

Kajian ini membantu saya memahami seperti apa kualitas dan standar penyusunan dokumen di daerah lain sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan.

#### **b. Melaksanakan Sharing session internal di Bapelitbangda**

Setelah melakukan kajian dokumen, saya melakukan sharing session dengan Bidang Sosial Budaya. Pada forum ini saya memaparkan hasil temuan dari dokumen daerah lain dan mendiskusikan perbedaannya dengan kebutuhan daerah kita.

Diskusi dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang kerangka PJPk, indikator yang harus diprioritaskan, serta konteks lokal yang harus dimasukkan.

Sharing session berlangsung interaktif dan menghasilkan banyak masukan, terutama terkait penyesuaian pilar, kebutuhan data tambahan, serta penekanan isu strategis lokal.

#### **c. Menyusun catatan pembelajaran & rekomendasi awal tentang PJPk**

Tahap ini dilakukan dengan merangkum hasil kajian dokumen dan hasil sharing session ke dalam bentuk catatan pembelajaran. Catatan tersebut memuat:

- poin-poin perbandingan PJPk daerah lain,
- rekomendasi penyesuaian struktur,
- masukan terkait indikator prioritas,
- arah awal penyusunan PJPk Kabupaten Padang Pariaman.

Catatan ini menjadi landasan awal sebelum penyusunan draft PJPk pada minggu berikutnya.

Produk kegiatan minggu keempat terdiri dari:

- ringkasan hasil benchmarking PJPk daerah lain,

- dokumentasi sharing session internal,
- catatan pembelajaran dan rekomendasi awal penyusunan PJPk.

Semua produk ini menjadi referensi penting untuk penyusunan draft awal PJPk.

#### **4. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tugas organisasi**

Kegiatan ini membantu Bapelitbangda meningkatkan kualitas penyusunan PJPk melalui pembelajaran dari daerah lain dan diskusi internal.

Benchmarking memperkaya wawasan tentang standar penyusunan dokumen, sementara sharing session memberikan perspektif lokal yang lebih relevan.

Kegiatan ini mendukung visi “Padang Pariaman Maju dan Sejahtera” melalui perencanaan berbasis data dan praktik baik.

Dari sisi misi, kegiatan ini memperkuat koordinasi internal, mendorong inovasi dalam penyusunan dokumen, dan memastikan bahwa perencanaan sesuai kebutuhan masyarakat.

#### **5. Analisis dampak jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS (Nilai Dasar ASN)**

##### **a. Dampak terhadap Satuan Kerja**

Tanpa nilai BerAKHLAK, benchmarking dapat dilakukan secara asal dan tidak mendalam, sehingga informasi yang diperoleh tidak bermanfaat.

Sharing session bisa menjadi tidak efektif jika tidak dilakukan secara harmonis dan kolaboratif. Hal ini akan mengurangi kualitas rekomendasi yang diperlukan untuk penyusunan PJPk, dan pada akhirnya melemahkan proses perencanaan di Bapelitbangda..

##### **b. Dampak terhadap Masyarakat**

Jika rekomendasi awal PJPk tidak berkualitas, dokumen PJPk berpotensi tidak menggambarkan kondisi nyata masyarakat.

Akibatnya, program pembangunan menjadi tidak tepat sasaran, tidak efektif, dan masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya dari kebijakan pemerintah.

## b) Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

### Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

<b>Nama Peserta</b>		: Nevris Marta, S.Sos.		
<b>Satuan Kerja</b>		: BAPELITBANGDA Kabupaten Padang Pariaman		
<b>Tempat Aktualisasi</b>		: BAPELITBANGDA Kabupaten Padang Pariaman		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Paraf Mentor
1.	10 Okt 25	Telah melakukan konsultasi dan meminta persetujuan	Surat izin Pelaksanaan Aktualisasi	
2.	24 Okt 25	Telah Mengumpulkan dan merekapkan data	Tabel rekap data awal untuk RJPK	
3.	31 Okt 25	Telah melakukan koordinasi dengan DPPKB	Konsultasi mengenai PSRI dengan DPPKB	
4.	31 Okt 25	Telah melaksanakan sharing internal	Best Practices dan sharing internal bidang	
5.				

**C) Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach**

<b>Nama Peserta</b>		<b>: Nevris Marta, S.Sos.</b>			
<b>Satuan Kerja</b>		<b>: PEMERINTAH KAB. PADANG PARIAMAN</b>			
<b>Tempat Aktualisasi</b>		<b>: BAPELITBANGDA BIDANG Sosial dan Budaya</b>			
<b>No</b>	<b>Tanggal/Waktu</b>	<b>Catatan Bimbingan</b>	<b>Hasil capaian/output</b>	<b>Media Komunikasi (Telpo n/WA/ L/ Email/ dll)</b>	<b>Paraf Coach</b>
1					
2					

<b>3</b> .					
<b>4</b> .					

## Lampiran 5. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-5.

### a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

<b>Judul Kegiatan No 1</b>	Melakukan Penyusunan Draft Awal Kerangka PJPk Kabupaten Padang Pariaman
<b>Tanggal Pelaksanaan Kegiatan</b>	3 November sampai dengan 14 November 2025
<b>Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Eviden ce</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengolah hasil data &amp; konsultasi dengan OPD</li> <li>2. Menyusun draft awal PJPk</li> <li>3. Melaksanakan Review bersama mentor &amp; atasan</li> <li>4. Membuat finalisasi draft awal PJPk</li> </ol>
<p><b>Uraian Kegiatan yang dilaksanakan:</b></p> <p><b>1. Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi</b></p> <p>Kegiatan 1 : Melakukan Penyusunan Draft Awal Kerangka PJPk Kabupaten Padang Pariaman</p> <p><b>a. Mengolah hasil data &amp; konsultasi dengan OPD</b></p> <p><b>Kompeten:</b> Saya menganalisis data dan masukan dari OPD untuk menghasilkan informasi yang relevan.</p> <p><b>Akuntabel:</b> Saya memastikan setiap data dan masukan yang digunakan jelas sumbernya dan terdokumentasi.</p> <p><b>Adaptif:</b> Saya menyesuaikan olahan data dengan format yang dibutuhkan untuk penyusunan PJPk.</p>	

**Kolaboratif:**

Saya menggunakan masukan OPD sebagai bagian dari hasil olahan data.

**Berorientasi Pelayanan:**

Saya menyajikan hasil olahan data untuk mendukung perencanaan berbasis evidence

**b. Menyusun draft awal PJPk**

**Berorientasi Pelayanan:**

Saya memastikan draft PJPk dapat menjadi pedoman arah pembangunan kependudukan daerah

**Kompeten:**

Saya menggunakan keahlian perencanaan untuk merumuskan dokumen awal PJPk yang sistematis.

**Akuntabel:**

Saya menyusun draft awal berbasis data dan masukan yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Loyal:**

Saya mendukung target RPJMD dan RPJPN melalui penyusunan draft PJPk.

**Adaptif:**

Saya menyesuaikan draft dengan kebijakan terbaru serta dinamika data kependudukan.

**c. Melaksanakan Review bersama mentor & atasan**

**Harmonis:**

Saya menghargai dan menerima masukan dari mentor dan atasan dengan sikap terbuka.

**Kolaboratif:**

Saya melibatkan mentor dan atasan untuk memperbaiki kualitas draft PJPk.

**Adaptif:**

Saya menyesuaikan draft berdasarkan masukan yang diberikan.

**Akuntabel:**

Saya merevisi draft sesuai masukan dan mendokumentasikan perubahan yang dilakukan.

**Loyal:**

Saya memastikan draft yang dihasilkan selaras dengan visi pembangunan nasional dan daerah.

**Berorientasi Pelayanan:**

Saya menjadikan hasil review sebagai sarana peningkatan kualitas draft PJPk agar lebih bermanfaat.

**d. Membuat finalisasi draft awal PJPk****Kompeten:**

Saya menyusun draft final awal dengan menerapkan prinsip evidence-based planning.

**Adaptif:**

Saya menyesuaikan finalisasi draft dengan dinamika data dan kebijakan terbaru.

**Loyal:**

Saya menjaga agar finalisasi draft selaras dengan target RPJMD, dan visi Indonesia Emas 2045.

**Berorientasi Pelayanan:**

Saya menghasilkan finalisasi draft awal PJPk sebagai dokumen dasar yang dapat menjadi rujukan penyusunan regulasi kabupaten.

**Kolaboratif:**

Saya memastikan finalisasi draft dilakukan dengan melibatkan OPD, mentor, dan atasan untuk menjamin kualitas dan kelengkapan.

**2. Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/evidence.****a. Teknis Aktualisasi****1. Analisis Data & Informasi**

Saya menggunakan teknik analisis data untuk mengolah hasil kompilasi data kependudukan dan masukan PSRI dari OPD. Teknik ini memastikan bahwa setiap indikator dianalisis secara konsisten sebelum dituangkan ke dalam draft PJPk.

## **2. Penyusunan Dokumen**

Proses penyusunan draft awal PJPk menggunakan teknik pengolahan informasi dan penyusunan kerangka dokumen. Saya menggabungkan hasil data, kajian dokumen, PSRI, dan rekomendasi minggu sebelumnya ke dalam bentuk struktur draft.

## **3. Review & Konsultasi Internal**

Saya melakukan review bersama mentor dan atasan dengan diskusi terarah. Teknik ini membantu mengidentifikasi bagian yang perlu diperbaiki dan menyesuaikan draft dengan kebutuhan organisasi.

## **4. Revisi & Finalisasi Dokumen**

Teknik editing dokumen digunakan untuk memperbaiki struktur, bahasa, data, dan konsistensi isi berdasarkan hasil review.

## B) Bukti Evidence:

### Tahapan 5.1 Mengolah Hasil data

#### C. Pembangunan Keluarga

Tabel 1.3 Isu Strategis Analisis Situasi Kependudukan Pembangunan Keluarga

No	Indikator	Pressure	State	Respon	Impact
1	Indeks Pembangunan Keluarga	<p>Masih tingginya angka perceraian dan pernikahan usia muda yang berdampak pada ketahanan keluarga.</p> <p>Rendahnya perencanaan keluarga berkelanjutan serta ketimpangan peran dalam pengasuhan anak.</p> <p>Masih terbatasnya akses layanan konseling keluarga, <u>parenting</u>, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.</p> <p>Tekanan ekonomi pada rumah tangga miskin menyebabkan rendahnya kualitas lingkungan pengasuhan dan pendidikan anak.</p>	<p>Nilai Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan tren peningkatan, namun belum mencapai target nasional.</p> <p>Dimensi ketentraman keluarga dan ketahanan ekonomi masih menjadi aspek yang paling lemah dibandingkan dimensi kemandirian dan ketangguhan keluarga.</p> <p>Dukungan pemerintah melalui program BKB (Bina Keluarga Balita), PIK-R, dan UPPKA sudah</p>	<p>- "1. Meningkatkan kualitas keluarga secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk kesehatan fisik dan mental, pendidikan ekonomi dan sosial budaya</p> <p>- 2. Focus meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan</p> <p>- 3. Penguatan data keluarga untuk pemantauan dan evaluasi yang lebih baik</p>	<p>Keluarga di Padang Pariaman lebih berdaya secara ekonomi dan psikososial.</p> <p>Penurunan angka perceraian dan pernikahan usia anak.</p> <p>Peningkatan kualitas pengasuhan dan pendidikan anak dalam keluarga.</p> <p>Meningkatnya ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan manusia berkelanjutan.</p>

### Tahapan 5.2 Draft PJKP Versi 1

docs.google.com/document/d/1jV0fpVOKIOSuPc5Ov7I6VDW1naWhFq7a/edit

[5 nov] PJKP on-going Nev .docx

File Edit Tampilan Sisipkan Format Alat Bantuan

Teks normal Arial 12 B I U A

PERATURAN BUPATI TENTANG  
PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
(PJKP)  
TAHUN 2025-2029  
DALAM GRAND DESIGN PEMBANGUNAN  
KEPENDUDUKAN (GDPK) TAHUN 2025-2050  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KATA PENGANTAR

Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 disusun sebagai panduan strategis dalam mengarahkan penyelenggaraan pembangunan kependudukan di daerah. Dokumen ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk melaksanakan pembangunan yang menempatkan penduduk tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dan

Tahapan 5.3 Review bersama Mentor dan atasan



## Tahapan 5.4 Finalisasi Draft Dokumen PJKP Kab. Padang Pariaman



### 3. Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan

#### a. Mengolah hasil data & konsultasi dengan OPD

Tahap awal dimulai dengan mengolah seluruh data kependudukan yang telah direkap pada minggu sebelumnya. Saya meninjau kembali tabel indikator, catatan konsultasi PSRI, serta data tambahan dari OPD untuk memastikan setiap indikator siap dimasukkan dalam draft. Proses ini mencakup pengecekan konsistensi angka, kesesuaian sumber data, serta memastikan bahwa PSRI setiap indikator sudah lengkap dan logis.

#### b. Menyusun draft awal PJKP

Setelah data siap, saya mulai menyusun draft awal dokumen PJKP. Penyusunan dilakukan berdasarkan struktur standar yang umum digunakan, seperti latar belakang, gambaran umum kependudukan,

analisis PSRI, isu strategis, serta arah kebijakan awal.

Saya merangkum indikator, menulis narasi pendukung, dan menggabungkan hasil analisis dari minggu sebelumnya. Draft awal ini menjadi versi pertama yang siap direview.

**c. Melaksanakan Review bersama mentor & atasan**

Draft awal kemudian saya konsultasikan kepada mentor dan atasan langsung. Review dilakukan untuk melihat apakah substansi sudah sesuai kebutuhan, kerangka dokumen sudah tepat, dan data yang ditampilkan akurat.

Selama proses review, mentor memberikan masukan terkait penajaman analisis, penyederhanaan narasi, serta penyesuaian struktur dokumen agar selaras dengan kebutuhan Bapelitbangda.

**d. Membuat finalisasi draft awal PJPk**

Berdasarkan hasil review, saya melakukan perbaikan dan penyempurnaan draft. Revisi dilakukan pada struktur bab, logika analisis PSRI, dan penyesuaian data indikator.

Finalisasi draft awal ini menjadi dasar sebelum masuk ke penyusunan versi lengkap PJPk selanjutnya.

Produk minggu kelima terdiri dari:

- Hasil olahan data dan analisis PSRI yang siap digunakan,
- Draft awal PJPk versi pertama,
- Catatan review mentor dan atasan,
- Draft awal PJPk versi revisi hasil finalisasi.

Kualitas produk menunjukkan bahwa penyusunan dokumen telah dilakukan secara sistematis dan sesuai kebutuhan organisasi.

**4. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tugas organisasi.**

Kegiatan penyusunan draft awal PJPk mendukung Bapelitbangda dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berbasis data dan analisis.

Draft awal ini memberikan kerangka awal yang kuat untuk memetakan isu kependudukan, arah kebijakan, serta intervensi pemerintah.

Kegiatan ini mendukung pencapaian visi “*Padang Pariaman Maju dan Sejahtera*” dengan menyediakan dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, dan bisa menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan.

Dari sisi misi, kegiatan ini memperkuat fungsi koordinasi, pengendalian data, dan kemampuan perencanaan yang lebih responsif di lingkungan Bapelitbangda.

## **5. Analisis dampak jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS (Nilai Dasar ASN)**

### **a. Dampak terhadap Satuan Kerja**

Jika penyusunan draft awal PJPK tidak dilakukan berdasarkan nilai BerAKHLAK, maka kemungkinan besar dokumen yang dihasilkan tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak menggambarkan kondisi kependudukan secara utuh.

Kurangnya komunikasi harmonis dengan mentor serta rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan data dapat menyebabkan kualitas dokumen menurun dan menghambat proses perencanaan daerah.

### **b. Dampak terhadap Masyarakat**

Draft PJPK yang tidak berkualitas dapat menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Masyarakat akan merasakan dampaknya melalui pelayanan publik yang kurang efektif dan program pembangunan yang tidak menyelesaikan masalah utama kependudukan.

Tanpa penerapan nilai-nilai ASN, penyusunan PJPK dapat kehilangan fokus dan berakhir tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

b) Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta		: Nevris Marta, S.Sos.		
Satuan Kerja		: BAPELITBANGDA Kabupaten Padang Pariaman		
Tempat Aktualisasi		: BAPELITBANGDA Kabupaten Padang Pariaman		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Paraf Mentor
1.	10 Okt 25	Telah melakukan konsultasi dan meminta persetujuan	Surat izin pelaksanaan Aktualisasi	y
2.	24 Okt 25	Telah mengumpulkan dan merekapkan data	Tabel rekap data awal untuk RJPK	y
3.	31 Okt 25	Telah melakukan koordinasi dengan DPPKB	Konsultasi mengenai PSP1 dengan DPPKB	M
4.	31 Okt 25	Telah melaksanakan sharing internal	Best Practices dan sharing internal bidang	A
5.	14 Nov 25	Telah menyelesaikan dokumen RPDK	Draft Dokumen RJPK (Analisis)	y

c) Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

<b>Nama Peserta</b>		<b>: Nevris Marta, S.Sos.</b>			
<b>Satuan Kerja</b>		<b>: PEMERINTAH KAB. PADANG PARIAMAN</b>			
<b>Tempat Aktualisasi</b>		<b>: BAPELITBANGDA BIDANG Sosial dan Budaya</b>			
<b>No</b>	<b>Tanggal/Waktu</b>	<b>Catatan Bimbingan</b>	<b>Hasil capaian/output</b>	<b>Media Komunikasi (Telpo n/WA/ L/ Email/ dll)</b>	<b>Paraf Coach</b>
1.					
2.					

<b>3</b> .					
<b>4</b> .					